

**PENGARUH NILAI TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS
DAN KONSEP *VALUE FOR MONEY* TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN DI BIDANG SEKTOR
PUBLIK PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA (BAPPEDASU)**

SKRIPSI

OLEH:

**SUCI RAHAYU
188330016**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/11/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/11/22

**PENGARUH NILAI TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS
DAN KONSEP *VALUE FOR MONEY* TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN DI BIDANG SEKTOR
PUBLIK PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA (BAPPEDASU)**

SKRIPSI

OLEH:

**SUCI RAHAYU
188330016**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/11/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/11/22

**PENGARUH NILAI TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS
DAN KONSEP *VALUE FOR MONEY* TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN DI BIDANG SEKTOR
PUBLIK PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA (BAPPEDASU)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area



OLEH:

**SUCI RAHAYU
188330016**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/11/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/11/22

HALAMAN PENGESAHAN

Judul skripsi : Pengaruh Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep *Value For Money* Terhadap Pengelolaan Keuangan di Bidang Sektor Publik Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (BAPPEDASU)

Nama : **SUCI RAHAYU**

Npm : 188330016

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing




(Hasbiana Dalimunthe, SE., M.Ak)
Pembimbing

Mengetahui:



(Ahmad Rafiki, BBA (Hons.), MMgt., Ph.D., CIMA)
Dekan



(Fauziah Rahman, S.Pd., M.Ak)
Ka. Program Studi

Tanggal/Bulan/Tahun Lulus: 26/September/2022

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat didalam skripsi ini.

Medan, 26 September 2022

Peneliti



Suci Rahayu
188330016

HALAMAN PERNYATAAN PERSEJUTUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUCI RAHAYU**
Npm : 188330016
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pengaruh Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep *Value for money* Terhadap Pengelolaan Keuangan di Bidang Sektor Publik Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (BAPPEDASU)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 26 September 2022
Yang Menyatakan

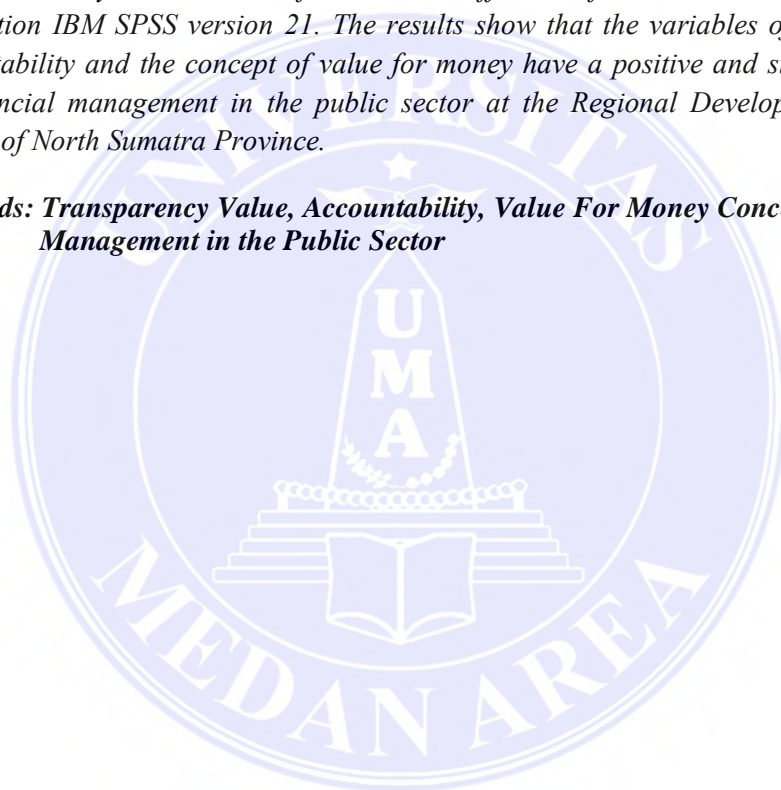


Suci Rahayu
Npm: 188330016

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the value of transparency, accountability and the concept of value for money on financial management in the public sector at the Regional Development Planning Agency of North Sumatra Province. This type of research is associative. The sample in this study were 41 state civil servants in planning, planning control and evaluation, economics, finance, program division, accountability and public information and information monitoring at the Regional Development Planning Agency of North Sumatra Province. Sources of data used in this study is primary data. Data collection techniques using questionnaire data. The data analysis technique used in this study consisted of descriptive statistical test, validity test, reliability test, normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, multiple linear regression analysis test, t-test, f-test, and coefficient of determination test using the application IBM SPSS version 21. The results show that the variables of transparency, accountability and the concept of value for money have a positive and significant effect on financial management in the public sector at the Regional Development Planning Agency of North Sumatra Province.

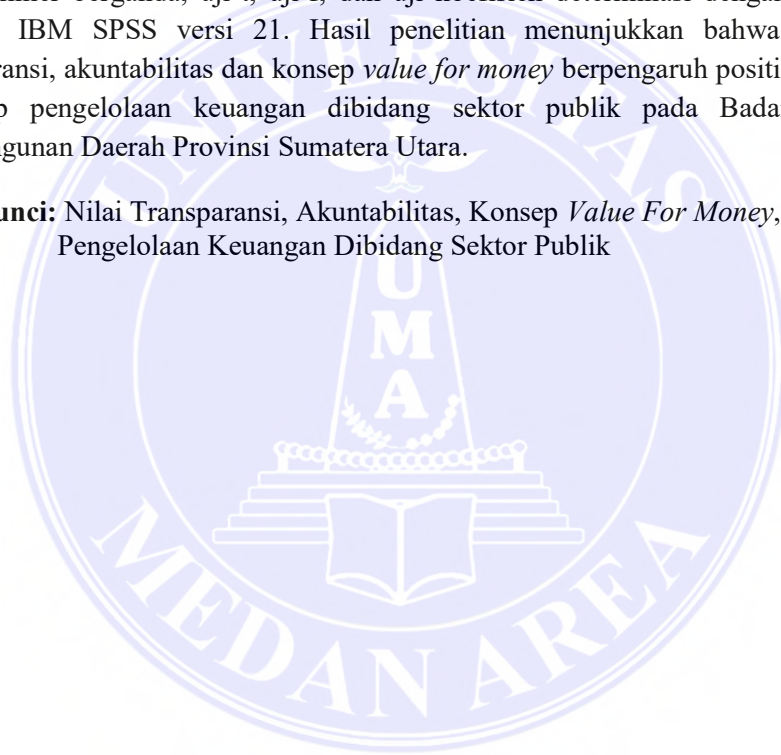
Keywords: *Transparency Value, Accountability, Value For Money Concept, Financial Management in the Public Sector*



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai transparansi, akuntabilitas dan konsep *value for money* terhadap pengelolaan keuangan dibidang sektor publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian ini adalah asosiatif. Sampel dalam penelitian ini adalah 41 orang aparatur sipil negara pada bidang perencanaan, bidang pengendalian dan evaluasi perencanaan, bidang perekonomian, bidang keuangan, bidang bagian program, akuntabilitas dan informasi publik dan bidang monitoring informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan data kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji analisis regresi linier berganda, uji-t, uji-f, dan uji koefisien determinasi dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel nilai transparansi, akuntabilitas dan konsep *value for money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan dibidang sektor publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Kata kunci: Nilai Transparansi, Akuntabilitas, Konsep *Value For Money*, Pengelolaan Keuangan Dibidang Sektor Publik



RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Suci Rahayu dilahirkan di Dusun Baru pada tanggal 31 Juli 2000 dari Ayah Langgeng dan Ibu Sulia. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Pada tahun 2018 peneliti telah lulus dari SMA Negeri 01 Mukomuko dan pada tahun 2018 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan area.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. *Shalawat* dan juga salam dipersembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad *Shallallahu'Alaihi wa Sallam* yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyyah ke zaman Islamiyah seperti sekarang. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Medan Area. Sehubungan dengan itu, maka disusun Skripsi ini yang berjudul: **“Pengaruh Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep *Value For Money* Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (BAPPEDASU)”**.

Dengan telah selesainya skripsi ini, peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki BBA (Hons), MMgt, Ph.D,CIMA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Medan Area.
4. Ibu Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan serta saran yang bermanfaat selama proses penulisan skripsi ini.

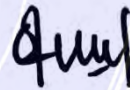
5. Ibu Warsani Purnama Sari, SE, Ak, MM selaku Dosen Pembimbing yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan juga masukan yang bermanfaat dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Retnawati Siregar, M.Si. selaku Ketua Sidang yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan juga masukan yang bermanfaat dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Ibu Indah Cahya Sagala, S.Pd, M.Si selaku Dosen Sekretaris yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan juga masukan yang bermanfaat dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan serta nasihatnya kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Medan Area.
9. Seluruh Staff Akademik Universitas Medan Area yang sudah memberikan kemudahan dalam proses administrasi.
10. Instansi tempat meneliti yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian dan beserta pihak-pihak yang terkait di dalamnya.
11. Teristimewa kepada kedua Orang Tua saya tercinta Bapak Langgeng dan Ibu Sulia, yang sudah memberikan do'a, dukungan, dan juga nasihat dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Abang saya Ridho Alansyah dan adik saya Bagus Tri Ananda yang telah membantu, memberikan do'a juga dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman-teman kelas Akuntansi A1 Stambuk 2018 terkhusus kepada Erika Wulandari, Novita Sari, M. Fikri Assidiq dan Intan Adiscia yang telah ikut membantu serta memberikan semangat kepada peneliti.

Akhirnya, peneliti sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Amin ya rabbal alamin.*

Medan, 26 September 2022
Peneliti



Suci Rahayu
188330016

DAFTAR ISI

ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik.....	14
2.1.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik	14
2.1.2 Indikator Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik.....	14
2.1.3 Prinsip Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik	16
2.1.4 Fungsi dan Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik	16
2.2 Nilai Transparansi	17
2.2.1 Pengertian Transparansi	17
2.2.2 Prinsip-Prinsip Transparansi	18
2.2.3 Indikator Transparansi	19
2.3 Akuntabilitas.....	20
2.3.1 Pengertian Akuntabilitas	20
2.3.2 Dimensi Akuntabilitas.....	21
2.3.3 Prinsip dan Jenis Akuntabilitas	21
2.3.4 Indikator Akuntabilitas.....	22
2.4 Konsep <i>Value For Money</i>	23
2.4.1 Pengertian <i>Value For Money</i>	23
2.4.2 Elemen-elemen Konsep <i>Value for Money</i>	24
2.4.3 Indikator <i>Value for Money</i>	25
2.4.4 Langkah-langkah pengukuran <i>Value for Money</i>	27
2.5 Penelitian Terdahulu.....	28
2.6 Kerangka Konseptual	31
2.7 Hipotesis Penelitian	32

2.7.1	Pengaruh Nilai Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik	33
2.7.2	Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik.....	34
2.7.3	Pengaruh Konsep <i>Value for Money</i> Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik	35
2.7.4	Pengaruh Simultan Nilai Transparansi, Akuntabilitas, Konsep <i>Value For Money</i> Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		38
3.1	Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
3.1.1	Jenis Penelitian.....	38
3.1.2	Lokasi Penelitian.....	38
3.1.3	Waktu Penelitian	38
3.2	Populasi dan Sampel.....	39
3.2.1	Populasi.....	39
3.2.2	Sampel.....	40
3.3	Definisi Operasional Variabel.....	41
3.4	Jenis dan Sumber Data	43
3.4.1	Jenis Data	43
3.4.2	Sumber Data.....	43
3.5	Teknik Pengumpulan Data	44
3.6	Teknik Analisis Data	44
3.6.1	Uji Statistik Deskriptif	45
3.6.2	Uji Kualitas Data.....	45
3.6.3	Uji Asumsi Klasik	46
3.6.4	Uji Analisis Regresi Linier Berganda	47
3.6.5	Uji Hipotesis Penelitian.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		50
4.1	Gambaran Umum Perusahaan	50
4.1.1	Sejarah BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara	50
4.1.2	Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara.....	51
4.1.3	Visi & Misi BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara	53
4.1.4	Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara	53
4.2	Deskriptif Responden	54
4.3	Hasil Teknik Analisis Data.....	60
4.3.1	Uji Statistik Deskriptif	60

4.3.2	Uji Validitas	62
4.3.3	Uji Reliabilitas	64
4.3.4	Uji Normalitas.....	65
4.3.5	Uji Multikolinearitas	66
4.3.6	Uji Heteroskedastisitas.....	67
4.3.7	Uji Analisis Regresi Linier Berganda	68
4.3.8	Uji Signifikansi Parsial (Uji-T).....	69
4.3.9	Uji Signifikansi Simultan (Uji-F).....	71
4.3.10	Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R ²)	72
4.4	Pembahasan Penelitian	73
4.4.1	Pengaruh Nilai Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik	73
4.4.2	Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik.....	74
4.4.3	Pengaruh Konsep <i>Value for Money</i> Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik	76
4.4.4	Pengaruh Simultan antara Nilai Transparansi, Akuntabilitas, dan Konsep Value For Money Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik.....	78
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
5.1	Kesimpulan.....	80
5.2	Saran.....	81
	DAFTAR PUSTAKA.....	83
	LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran.....	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian.....	39
Tabel 3.2 Jumlah Pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Utara	39
Tabel 3.3 Sampel Penelitian.....	40
Tabel 3.4 Variabel Independen	42
Tabel 3.5 Variabel Dependen.....	43
Tabel 3.6 Bobot Nilai Kuesioner	44
Tabel 4.1 Data Penyebaran Kuesioner	54
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	55
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	55
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	56
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan	57
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	57
Tabel 4.7 Tanggapan Responden Variabel Y	58
Tabel 4.8 Tanggapan Responden Variabel X1	59
Tabel 4.9 Tanggapan Responden Variabel X2	59
Tabel 4.10 Tanggapan Responden Variabel X3	60
Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	60
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas.....	63
Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas.....	64
Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov Test</i>	65
Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolinearitas.....	67
Tabel 4.16 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	68
Tabel 4.17 Hasil Uji T Parsial.....	70
Tabel 4.18 Hasil Uji F Simultan	71
Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara	52
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Berdasarkan Grafik Histogram	65
Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas Berdasarkan Normal P-P Plot Regresi	66
Gambar 4.4 Hasil Uji Heterokedastisitas Menggunakan <i>Scatter Plot</i>	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	87
Lampiran 2 Jawaban Responden.....	93
Lampiran 3 Uji Statistik Deskriptif.....	97
Lampiran 4 Uji Normalitas Data.....	97
Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik	102
Lampiran 6 Analisis Regresi Linear Berganda	103
Lampiran 7 Uji Hipotesis	104
Lampiran 8 Surat Izin Penelitian.....	105
Lampiran 9 Surat Selesai Penelitian	106



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan sektor publik menurut Bratakusumah dan Solihin (2004) adalah semua hak dan kewajiban pusat dan daerah terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja suatu pemerintah daerah. Kefektifan dan keefisienan pengelolaan keuangan sektor publik sangat berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, dapat disimpulkan kinerja keuangan akan semakin baik apabila pengelolaan keuangan diolah secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan daerah merupakan semua program kegiatan yang dilaksanakan oleh para pejabat yang berwenang dalam pengelolaan keuangan yang terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban (Hasugian et al., 2021).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006, yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban termasuk dalam bentuk kekayaan yang dimiliki oleh suatu daerah yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahannya sendiri dan dapat dinilai secara moneter. Rangkaian proses atau siklus pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari proses penganggaran terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan akuntansi untuk pelaksanaan APBD.

Sedangkan, pihak pengelola keuangan daerah terdiri dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang merupakan kepala satuan pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran daerah dan sekaligus bertindak sebagai bendahara umum daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, akuntabel, tertib, efektif, efisien, dan ekonomis serta didasarkan atas prinsip keadilan, kepatuhan dan kemanfaatan bagi masyarakat (Sains Fakultas Sosial, 2018).

Pemerintah daerah wajib menerbitkan laporan keuangan yang berkualitas, dimana kualitas laporan keuangan tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan sektor publik yang baik dan telah memenuhi tertib asas dan administrasinya. Laporan keuangan pemerintah daerah dinyatakan sudah berkualitas apabila dengan diterimanya opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sebagai indikatornya. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang berkualitas harus relevan, jika dalam penyajian laporan keuangan tidak relevan dan tidak dapat diandalkan maka informasi tidak dapat digunakan atau dipercaya oleh pihak pengguna informasi tersebut. Oleh karena itu, Laporan keuangan yang berkualitas sangatlah penting. Dalam prosedur pelaporan keuangan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan. Setelah sesuai dengan standar yang berlaku, kemudian laporan keuangan daerah harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Adhi dan Suhardjo, 2013).

Mardiasmo (2004) menegaskan bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik apabila terdapat mekanisme

pengelolaan keuangan yang baik pula. Isu mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah saat ini menjadi sorotan publik karena belum memperlihatkan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebagai perwujudan dari konsep otonomi daerah, masyarakat menuntut agar pemerintah daerah mempunyai kinerja keuangan yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya (Firmansyah & Rahmawati, 2020). Apabila pemerintah mampu mengelola pemerintahannya hingga masyarakat dapat merasakan kesejahteraan secara keseluruhan, maka pemerintahan itu dapat dikatakan mempunyai kinerja keuangan yang baik. Pemerintah harus memiliki kinerja keuangan yang baik mengingat semakin meningkatnya tuntutan mengenai hal ini termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bertepatan dengan dilaksanakannya otonomi daerah melalui Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah merupakan pemerintah yang sering menjadi sorotan publik salah satunya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara seiring dengan terjadinya suksesi kepemimpinan atau pergantian Kepala Daerah pada tahun 2021 lalu. Oleh karena itu, agar manajemen pemerintahan yang akuntabel segera terwujud, Kepala Daerah terpilih yang baru diharapkan harus mampu berusaha mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama dengan 486 pemerintah daerah yang lain mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020. Dapat disimpulkan bahwa kinerja

keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah pada level yang baik sehingga Kepala Daerah terpilih wajib mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke level yang lebih baik lagi.

Fenomena yang terjadi seiring dengan perkembangan pengelolaan keuangan sektor publik pada masyarakat Indonesia saat ini yaitu guna meningkatkan terwujudnya *good governance* yang sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan pemerintahan maka muncul lah tuntutan pemerintah agar organisasi sektor publik dalam pelaksanaan kegiatannya harus menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan pemerintah daerahnya. Disamping undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada dasarnya semua peraturan tersebut menghendaki penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan di tetapkan nya Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) No. 29 Tahun 2014 menjelaskan tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana pemerintahan memberikan kewajiban berbagai instansi baik pusat dan juga daerah serta eselon II untuk mengimplementasikan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Selanjutnya, mengingat perlunya keterbukaan atas informasi mengenai aktivitas dan kebijakan pemerintah daerah, maka dibentuklah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) yaitu

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang membahas mengenai transparansi kegiatan dan aktivitas pemerintah daerah (Saskia et al., 2020).

Menurut Mardiasmo (2016 : 20) “Transparansi merupakan keterbukaan (*openness*) pemerintahan untuk menyediakan informasi mengenai kegiatan pengelolaan sumber daya publik untuk orang-orang yang memerlukan informasi”. Pemerintah disebutkan berkewajiban untuk memberikan dan menyediakan informasi, baik berupa informasi finansialnya maupun informasi lain yang kemudian dipergunakan untuk pertimbangan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukan. Selanjutnya, menurut Mardiasmo (2016 : 30) “Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang ditunjuk sebagai pemegang amanah (*agent*) untuk dapat menyajikan, memberi pertanggung jawaban, melaporkan, serta mengungkapkan semua kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang mempunyai hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban tersebut”. Instansi sektor publik memperoleh tuntutan untuk lebih efisien, mempertimbangkan biaya ekonomi dan sosial, serta mempertimbangkan pengaruh negatif mengenai kegiatan yang dilaksanakan, karena sektor publik sering sekali dipandang negatif bagi sebagian pihak, contohnya dianggap sarang dari inefisiensi, asal usul kebocoran dana sekaligus sumber pemborosan serta sektor selalu merugi maka timbul lah permintaan agar organisasi sektor publik lebih memperhatikan kualitas dan profesionalisme dan harus fokus pada konsep *Value for Money* (Mardiasmo, 2009).

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran, lembaga sektor publik sering sekali mendapat perhatian dari masyarakat termasuk Bappeda Provinsi Sumatera Utara. Bappeda bertugas untuk mengatur semua permasalahan tentang

perencanaan dan pembangunan daerah, maka dari itu Bappeda dituntut untuk transparansi dan akuntabel dalam menjalankan pengelolaan anggarannya untuk publik. Selain itu dalam melaksanakan kegiatannya, pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan perencanaan biaya yang akan digunakan agar sehemat mungkin dengan hasil yang memuaskan untuk menghindari pemborosan anggaran. Pendapat publik mengenai besarnya jumlah anggaran yang dianggarkan yang dianggap sebagai pemborosan tersebutlah yang dijadikan sebagai dasar pentingnya memperhatikan konsep *Value for Money* untuk dikaji lebih dalam pada saat merencanakan anggaran yaitu dengan memperhatikan konsep ekonomi, efisiensi dan juga efektivitas (Septariani, 2018).

Untuk mengimplementasikan dan mencapai sasaran atau target dari prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara, maka Bappeda Provinsi Sumatera Utara diwajibkan melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang dianggarkan mengacu pada program dan kegiatan yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun beberapa program yang dimaksud dan ringkasan laporan realisasi anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel I.1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2020

Program	2017			2018			2019			2020		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.300.400.000	4.050.889.715	99,19%	3.646.218.550	3.288.563.160	90,19%	2.987.513.862	2.766.972.927	92,61%	7.442.664.987	1.144.058.119	15,37%
2. Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah	6.542.262.000	5.883.511.884	89,93%	5.019.204.550	4.328.590.101	86,24%	5.939.006.775	5.267.606.447	88,69%	7.777.984.150	545.731.050	7,01%
3. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh	200.000.000	188.675.600	94,33%	167.398.000	151.813.050	90,69%	183.254.000	125.907.841	68,70%	-	-	-
4. Program Pengembangan Data & Informasi	2.275.511.900	2.033.845.400	89,37%	2.274.943.151	2.147.567.850	94,40%	1.721.633.673,92	1.630.472.552	94,70%	2.271.344.500	332.512.632	14,63%
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja & Keuangan	73.895.000	66.976.400	90,63%	10.508.650	8.418.000	80,11%	-	-	-	14.200.000	Tidak dilaksanakan karena refocussing anggaran	-
6. Program Perencanaan & Penataan Ruang	606.300.000	589.171.900	97,17%	212.279.500	198.020.250	93,28%	214.485.000	198.877.900	92,72%	-	-	-
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	-	-	6.592.576.276	6.317.785.191	95,83%	7.140.725.550	2.451.686.994	34,33%
8. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	-	-	-	-	-	-	759.591.580	185.058.731	24,36%	581.105.750	249.114.300	42,87%
9. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	-	-	119.000.000	92.740.500	77,93%	179.000.000	Tidak dilaksanakan karena refocussing anggaran	-
10. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248.456.000	Tidak dilaksanakan karena refocussing anggaran	-
JUMLAH TOTAL	13.998.368.900	12.813.070.889	91,53%	11.330.552.401	10.122.972.411	89,34%	18.517.091.167	16.585.422.089	89,56%	25.655.480.937	4.723.103.095	18,40%

Sumber: LAKIP Bappeda Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan tabel ringkasan laporan realisasi anggaran yang tertera diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 4 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017-2020 pelaksanaan realisasi anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Utara mengalami ketidakstabilan naik turun.

Jumlah realisasi paling rendah terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah anggaran Rp. 25.655.480.937 dan realisasi nya sejumlah Rp. 4.723.103.095. Hal ini disebabkan karena munculnya pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh Negara, yang kemudian pemerintah pusat mengeluarkan arahan kebijakan untuk melakukan perubahan program/kegiatan serta pendanaan seluruh daerah dengan mewajibkan seluruh Pemerintah Daerah melaksanakan *refocussing* anggaran dalam rangka penanganan serta penyebaran Covid-19. Adanya Pandemi Covid-19 ini lah yang membuat pelaksanaan realisasi anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Utara kurang berjalan secara optimal. Namun demikian, walaupun adanya Pandemi Covid-19 tidak mengurangi harapan masyarakat agar instansi pemerintah tetap berupaya semaksimal mungkin dalam pelaksanaan realisasi anggarannya agar sesuai dan tercapai apa yang menjadi tujuan, sasaran serta target bagi instansi maupun masyarakat.

Perubahan pertumbuhan dari pelaksanaan realisasi anggaran adalah salah satu faktor yang diperlukan dalam penilaian kinerja pengelolaan keuangan yang terdapat pada organisasi dan menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Informasi ini berguna bagi pemakai laporan untuk proses pengambilan keputusan terkait alokasi dana sumber daya ekonomis, ketaatan pemerintah daerah mengenai anggaran dan akuntabilitas. Namun demikian, Bappeda Provinsi Sumatera Utara

terus berupaya semaksimal mungkin untuk fokus menyesuaikan terkait perubahan serta pengembangan proses penyusunan dan realisasi anggarannya.

Pemenuhan tuntutan masyarakat kepada pemerintah masih menemui banyak permasalahan, terutama di pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa instansi yang paling sering diadukan oleh masyarakat adalah Pemerintah Daerah (Ombudsman RI, 2017). Kurang transparannya proses penyelenggaraan pemerintah di daerah lah yang mengakibatkan pemerintah daerah menjadi instansi yang paling sering mendapat kritik dari masyarakat. Sehingga hal ini dapat menciptakan kesempatan adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh para petinggi. Masalah tersebut yang mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perubahan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang profesional. Salah satunya dengan e-Budgeting. Melalui peraturan Gubernur Nomor 145 tahun 2013 mengenai penyusunan RAPBD/APBDP pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menggagas penerapan e-Budgeting pada tahun 2013. Keberhasilan penerapan e-Budgeting pertama kali diterapkan oleh kota Surabaya yang kemudian Pemprov DKI Jakarta mempelajari sistem ini karena sistem ini diakui mampu mengurangi adanya anggaran-anggaran 'siluman' dan inefisiensi anggaran daerah, karena adanya pengawasan mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Selain itu, penyusunan anggaran akan lebih efektif dan efisien apabila menggunakan sistem e-Budgeting karena dilakukan secara elektronik. Namun, menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di beberapa daerah untuk penerapan e-Budgeting dinilai belum berjalan secara baik dan maksimal dalam mengurangi dan mencegah pemborosan anggaran, disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atau peng-iklanan mengenai

sistem e-Budgeting tersebut kepada masyarakat dan penerapannya yang tidak terintegrasi dengan capaian kinerja yang diinginkan.

Terlebih lagi ditengah pandemi Covid-19 saat sekarang ini, yang mana agar masyarakat tidak resah maka masyarakat sangat membutuhkan informasi dan data yang tidak simpang siur dan informasi yang benar-benar telah terintegritas antara data di badan publik pusat dengan data di badan publik daerah. Pemerintah diharapkan mampu memajukan nilai transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan daerahnya. Untuk tercapainya hal ini yaitu pemerintah berkewajiban menyediakan segala informasi tentang keuangan yang tepat, jujur serta terbuka kepada masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah menjalankan amanah publik. Selain itu juga berkewajiban untuk menerapkan konsep *value for money* dalam memperhatikan ekonomi, efisiensi dan efektivitas sebagai upaya menciptakan *good governance*.

Penelitian sebelumnya seperti Redi Antonius Nababan, Marlon Sihombing, & Husni Thamrin (2018) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Berkonsep *Value for Money* pada Pemerintah di Kabupaten Dairi, Hasil penelitiannya Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan berkonsep *Value for Money*. Sejalan dengan penelitian Ricky Ari Syahputra (2018) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, *Value for Money*, Kejujuran, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Pusat) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa *Value For Money*, Kejujuran, Transparansi dan Pengawasan berhubungan secara positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan

Daerah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang nilai transparansi dan akuntabilitas serta konsep *value for money* yang ada pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara.

Dari uraian diatas penelitian ini dilakukan untuk mengetahui **Pengaruh Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep *Value for Money* Terhadap Pengelolaan Keuangan Dibidang Sektor Publik Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (BAPPEDASU).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah nilai transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dibidang sektor publik pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dibidang sektor publik pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah konsep *value for money* berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dibidang sektor publik pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah nilai transparansi, akuntabilitas dan konsep *value for money* berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan dibidang sektor publik pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh nilai transparansi terhadap pengelolaan keuangan dibidang sektor publik pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dibidang sektor publik pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh konsep *value for money* terhadap pengelolaan keuangan dibidang sektor publik pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara.
4. Keterlibatan nilai transparansi, akuntabilitas dan konsep *value for money* berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan dibidang sektor publik pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan mengenai pengaruh nilai transparansi, akuntabilitas dan konsep *value for money* terhadap pengelolaan keuangan dibidang sektor publik pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara.

2. Bagi BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi mengenai pentingnya nilai transparansi, akuntabilitas dan konsep *value for money* terhadap pengelolaan keuangan dibidang sektor publik sehingga dapat menjadi masukan atau pedoman dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara.

3. Bagi Akademisi

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi kedepannya untuk kegiatan penelitian yang sejenis yaitu mengenai peranan nilai transparansi, akuntabilitas dan konsep *value for money* terhadap pengelolaan keuangan dibidang sektor publik pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik

2.1.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik

Pengelolaan keuangan sektor publik menurut Bratakusumah dan Solihin (2004) adalah semua hak dan kewajiban pusat dan daerah terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja suatu pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan semua program kegiatan yang dilaksanakan oleh para pejabat yang berwenang dalam pengelolaan keuangan yang terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan sektor publik tidak terlepas dari ilmu akuntansi sektor publik. Menurut Abdul Halim (2012 : 3) “Akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengidentifikasian, pencatatan dan pelaporan mengenai transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM dan lain-lain yang dapat dijadikan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak yang membutuhkan”.

2.1.2 Indikator Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik

Sedangkan yang menjadi indikator dalam pengelolaan keuangan sektor publik menurut Mardiasmo (2016 : 18) yaitu:

1. Penyediaan informasi
Pengelolaan keuangan sektor publik berkaitan erat dengan peran akuntansi dalam penyediaan informasi keuangan untuk pihak eksternal organisasi. Keterbukaan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan keuangan daerah agar dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.
2. Pengendalian manajemen
Tujuan pengendalian manajemen yaitu untuk memastikan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai kebijakan yang berlaku, menjaga aset atau keuangan dalam sebuah organisasi, serta menghasilkan laporan keuangan yang akurat, tepat, ekonomis, efektif dan efisien.
3. Akuntabilitas
Laporan keuangan yang telah diaudit oleh inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan merupakan bentuk dari akuntabilitas publik. Selain itu, Anggaran daerah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik melalui DPRD.

Menurut Mustari (2020) dalam penelitiannya indikator akuntansi sektor publik sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu
2. Koordinasi
3. Rentang manajemen
4. Target dan sasaran
5. Produktivitas

Pengelolaan keuangan sektor publik berkaitan erat dengan peran akuntansi dalam penyediaan informasi keuangan untuk pihak eksternal organisasi. Oleh karena itu, pelaporan keuangan sektor publik merupakan alat penting terciptanya akuntabilitas publik. Menurut Saskia et al., (2020) indikator pengelolaan akuntansi sektor publik berisi tentang:

1. Standart akuntansi keuangan sektor publik.
2. Sistem akuntansi keuangan sektor publik.

2.1.3 Prinsip Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik

Dalam kehidupan bisnis, permasalahan dalam pengelolaan keuangan sektor publik sangat perlu dipertimbangkan. Sehingga Mardiasmo (2016) membagi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sektor publik sebagai berikut:

1. Transparansi yang artinya keterbukaan, yaitu keterbukaan dalam pelaksanaan program atau kegiatan.
2. Akuntabilitas yang memiliki makna keadaan seseorang yang berdasarkan hasil pekerjaannya dapat diukur dan dinilai oleh oranglain dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
3. Efektivitas merupakan tercapainya tujuan yang sudah ditentukan. Pengelolaan keuangan disebut efektif apabila aktivitas yang dijalankan dapat mengelola keuangan tujuan organisasi dengan hasil yang diinginkan.
4. Efisiensi mengacu pada kuantitas berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan. Efisiensi adalah perbandingan *input* serta *output* yang antarlain dana, daya, waktu.

2.1.4 Fungsi dan Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik

Akuntansi berfungsi sebagai penyedia sekaligus pemberi informasi keuangan kepada pihak eksternal yang berhubungan dengan akuntansi keuangan sektor publik. Pentingnya informasi akuntansi berkembang bersamaan dengan meluasnya permintaan akuntabilitas dan transparansi oleh organisasi publik untuk diimplementasikan. Pelaporan keuangan sektor publik merupakan alat penting agar terciptanya akuntabilitas publik. Selain itu, pelaporan keuangan sektor publik yang tepat dan andal memerlukan standar dan sistem akuntansi sektor publik yang baik. Secara garis besar, fungsi-fungsi dari laporan keuangan sektor publik menurut Mardiasmo (2016 : 184) antara lain:

1. Sebagai bentuk ketaatan dan pengelolaan.
2. Sebagai bentuk akuntabilitas tanggungjawab dan pelaporan.
3. Sebagai bentuk perencanaan dan informasi otorisasi.
4. Sebagai bentuk keberlangsungan organisasi.
5. Sebagai bentuk interaksi dengan masyarakat.
6. Sebagai sumber fakta dan gambaran.

2.2 Nilai Transparansi

2.2.1 Pengertian Transparansi

Mardiasmo (2016 : 30) menyebutkan bahwa “Transparansi adalah keterbukaan (*openness*) pemerintah untuk menyediakan informasi seluas-luasnya tentang kegiatan atas pengelolaan sumber daya publik untuk pihak yang memerlukan informasi tersebut”. Pemberian informasi keuangan dan informasi lainnya yang berguna oleh pihak yang memerlukan untuk proses pengambilan keputusan merupakan kewajiban pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintahan (2016) menerangkan “Transparansi memiliki makna yaitu memberikan informasi keuangan maupun informasi lainnya dengan terbuka serta jujur kepada masyarakat didasarkan pada pemahaman bahwasanya publik berhak untuk tahu secara eksplisit dan komprehensif mengenai tanggungjawab pemerintah dalam proses pengelolaan sumber daya yang sudah dipercayakan kepada mereka dan kepatuhan mereka terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sedangkan menurut Mustopadidjaja (2003) “Transparansi merupakan adanya sifat keterbukaan yang diberikan pemerintah dalam penyusunan kebijakan agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, yang kemudian transparansi akan melahirkan akuntabilitas antara rakyat dengan pemerintah”.

Mardiasmo (2016 : 30) mendeskripsikan beberapa tujuan dari transparansi dalam pelaksanaan sistem pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Transparansi sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
2. Transparansi sebagai usaha pengembangan manajemen penyelenggaraan pemerintahan.
3. Transparansi sebagai usaha pengembangan tata kelola dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang baik serta sebagai usaha untuk menghilangkan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

2.2.2 Prinsip-Prinsip Transparansi

Menurut *Humanitarian Forum* Indonesia (HFI) terdapat 6 prinsip transparansi antara lain sebagai berikut:

1. Tersedianya informasi yang mudah untuk dimengerti dan diakses (dana/biaya, metode pengimplementasian, program kegiatan).
2. Tersedianya media dan publikasi yang berkaitan dengan prosedur aktivitas serta rincian keuangan.
3. Tersedianya laporan secara periodik tentang penyalahgunaan sumber daya pada proses kemajuan rencana kerja yang bisa diakses oleh publik.
4. Laporan tahunan.
5. Media publikasi instansi atau situs web yang sudah diatur.
6. Pedoman untuk penyebaran informasi.

Prinsip dan asas transparansi bukan hanya mengenai hal yang berkaitan dengan keuangan saja, tetapi menurut Mustopadidjaja (2003) transparansi pemerintahan pada perencanaan pun mencakup 5 (lima) hal antara lain:

1. Keterbukaan dalam pertemuan-pertemuan fundamental yang mana publik ikut menyampaikan aspirasinya.
2. Keterbukaan dalam pengungkapan informasi terkait dokumen yang harus diketahui publik.
3. Keterbukaan mengenai tatacara (proses pengambilan keputusan dan prosedur perencanaan).
4. Keterbukaan catatan yang memuat kebenaran hukum (buku tanah, catatan sipil dan lainlain).
5. Keterbukaan untuk menerima partisipasi masyarakat.

Prinsip transparansi dapat mewujudkan kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah dengan menyediakan informasi yang benar, tepat serta lengkap. Secara umum transparansi akan menghilangkan rasa keraguan dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan, selain itu transparansi dapat mengurangi kesempatan seseorang untuk melakukan korupsi dalam lingkungan

pemerintah daerah karena keikutsertaan partisipasi masyarakat ketika pengambilan keputusan.

2.2.3 Indikator Transparansi

Transparansi mengarah pada pemberian dan ketersediaan informasi kepada masyarakat umum, keterbukaan Undang-Undang, peraturan serta keputusan pemerintah, dengan beberapa yang menjadi indikatornya.

Menurut Andrianto (2007 : 21) untuk menciptakan nilai transparansi di lembaga publik dapat diukur berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Terdapat atau tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi.
2. Terdapatnya kemudahan akses bagi publik terhadap transparansi penyusunan anggaran.
3. Terdapatnya audit yang efektif serta independen.
4. Terdapatnya campur tangan atau keterlibatan publik mengenai pembuatan dan penyusunan anggaran.

Sedangkan dikutip berdasarkan penelitian sebelumnya dari Mustari (2020) indikator transparansi terdiri dari:

1. Pengaksesan mengenai informasi dilakukan dengan benar dan tepat waktu.
2. Penyediaan dan pemberian informasi secara spesifik mengenai tatacara dan pembiayaan.
3. Pengaksesan informasi yang mudah dilakukan.
4. Membentuk mekanisme pengaduan bila terdapat kesalahan.

Menurut Kristianten (2006) berpendapat transparansi dapat dinilai dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen.
2. Kelengkapan dan keterbukaan informasi.
3. Adanya keterbukaan atas suatu prosedur.
4. Kerangka peraturan yang dapat membuktikan transparansi.

Transparansi merupakan sifat keterbukaan sektor pemerintahan kepada masyarakat mengenai seluruh informasi yang berhubungan dengan proses administrasi pemerintah.

2.3 Akuntabilitas

2.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris "*accountability*" yang artinya pertanggungjawaban atau adanya suatu kondisi untuk dimintai pertanggungjawaban. Menurut Mardiasmo (2016) menerangkan bahwa "Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang ditunjuk sebagai pemegang amanah (*agent*) untuk dapat menyajikan, memberi pertanggungjawaban, melaporkan, serta mengungkapkan semua aktivitas sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang mempunyai hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban tersebut".

Standar Akuntansi Pemerintahan (2016) mendefinisikan "Akuntabilitas adalah kepercayaan yang diberikan kepada entitas pelaporan untuk mencapai tujuan dengan mempertanggungjawabkan kegiatan penyelenggaraan sumber daya dan kebijakan yang telah ditetapkan".

Akuntabilitas publik diketahui terbagi atas 2 (dua), yaitu akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) yaitu pertanggungjawaban mengenai pengelolaan dana yang ditujukan bagi kekuasaan yang lebih tinggi seperti unit kerja dinas kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, selanjutnya pemerintah pusat kepada DPR serta akuntabilitas

horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pertanggungjawaban kepada publik atau masyarakat luas (Kusumastuti : 2014).

2.3.2 Dimensi Akuntabilitas

Terdapat 4 (empat) dimensi akuntabilitas menurut Elwood (1993) antara lain:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*)
Akuntabilitas hukum (*legal accountability*) mengacu pada penegakan hukum serta peraturan lain yang diperlukan untuk penerapan dana publik. *Accountability for probity* mengacu pada pencegahan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).
2. Akuntabilitas proses
Untuk menilai prosedur yang dilaksanakan pada pelaksanaan kegiatan sudah terlaksana dengan tepat atau belum dalam kaitannya dengan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi, inilah yang di maksud dalam akuntabilitas proses. Akuntabilitas proses adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif, tanggap, dan hemat biaya.
3. Akuntabilitas program
Akuntabilitas program lebih memperhatikan terkait sasaran yang sudah ditentukan bisa terwujud atau tidak, dan juga memperhatikan preferensi kegiatan program yang menunjukkan hasil terbaik dengan menggunakan biaya terendah.
4. Akuntabilitas kebijakan
Akuntabilitas kebijakan mengacu pada pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah mengenai prosedur yang dibuat oleh pemerintah bagi DPRD dan masyarakat luas.

Menguatnya tuntutan akuntabilitas tidak dapat terlepas pada akuntansi sektor publik, karena pada dasarnya akuntansi sektor publik diharapkan dapat memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik dan sebagai alat perencanaan serta pengendalian bagi instansi sektor publik secara efektif dan efisien (Sayuti et al., 2018).

2.3.3 Prinsip dan Jenis Akuntabilitas

Yang dinyatakan oleh Lembaga Administrasi Negara (2000) dalam melaksanakan akuntabilitas pada organisasi pemerintah, prinsip-prinsip yang wajib diketahui sebagai berikut:

1. Pemimpin instansi dan seluruh pegawai berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan sesuai misi secara akuntabel.
2. Sistem yang dijalankan harus dapat menjamin sumber daya yang dipakai sudah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Mampu memperlihatkan tingkat tercapainya tujuan serta sasaran. Harus selaras untuk mencapai visi misi, hasil dan manfaat yang dirasakan”
4. Adil, objektif, transparan serta inovatif untuk menunjang perubahan manajemen organisasi pemerintah dalam pembaharuan metodologi, pengakuan kinerja dan pelaporan akuntabilitas.

Bintoro Tjokroamidjojo (2001) menyatakan bahwa terdapat 4 (empat)

jenis akuntabilitas yaitu:

1. Akuntabilitas politik pemerintahan dengan lembaga perwakilan.
2. Akuntabilitas keuangan dengan melembagakan anggaran serta pengawasan BPK.
3. Akuntabilitas hukum yaitu berupa pembaharuan dibidang hukum serta perkembangan perangkat hukum.
4. Akuntabilitas ekonomi yaitu berupa likuiditas pemerintahan demokratis yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat lewat sistem perwakilan.

2.3.4 Indikator Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2016 : 21), akuntabilitas publik mempunyai beberapa indikator yaitu:

1. Kejujuran dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*).
2. Prosedur pelaksanaan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi.
3. Pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan pertimbangan mengenai alternatif program yang dapat memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal.
4. Kebijakan mengenai pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah.

Beberapa indikator akuntabilitas yang dikemukakan Shafratunnisa (2016) antara lain:

1. Pencapaian sasaran tujuan pada pengelolaan keuangan sektor publik.
2. Terdapat partisipasi pemerintah pada pengelolaan keuangan sektor publik.
3. Terdapat pengawasan oleh tim pelaksanaan.
4. Terdapat laporan mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di sektor publik.

Sedangkan menurut Krina P (2003) menyebutkan bahwa akuntabilitas dapat diukur berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kegiatan pengambilan keputusan ditentukan secara tertulis dan tersedia bagi publik yang memerlukannya, dengan setiap keputusan yang ditetapkan sudah sesuai dengan standar etika, nilai-nilai yang berlaku, serta prinsip administrasi yang tepat.
2. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berkaitan dengan prosedur dalam mencapai tujuan kegiatan program.
3. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang diterapkan.
4. Konsistensi dan kelayakan dari target operasional.
5. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

2.4 Konsep *Value For Money*

2.4.1 Pengertian *Value For Money*

Value for money memiliki makna penghargaan terhadap nilai uang. Menurut Mardiasmo (2016 : 5) “*Value for money* adalah suatu konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisien dan efektivitas”. Konsep *value for money* disebut sebagai pokok utama dari pengukuran atau penilaian kinerja di sektor publik karena itu merupakan konsep ini penting diterapkan dalam organisasi sektor publik.

Menurut Abdul Halim (2012 : 132) “Konsep *Value for money* yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menilai dan mengukur nilai ekonomi, efektivitas, dan efisiensi kinerja program dari suatu organisasi”. Konsep *value for money* muncul karena adanya pandangan bahwa sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, asal mula kebocoran dana sekaligus sebagai organisasi yang sering mengalami kerugian. Maka dari itulah muncul adanya suatu paksaan kepada organisasi sektor publik untuk lebih mencermati *value for money* dalam melaksanakan kegiatannya. Dalam menilai kinerja pemerintah bukan hanya dipertimbangkan dari sisi *output* yang dihasilkan dari suatu kegiatan saja, namun perlu juga memperhatikan *input*, *output* dan *income* pada saat yang bertepatan.

Input adalah sumber daya berupa masukan yang digunakan dalam pengimplementasian suatu prosedur, program dan aktivitas. *Output* dapat disebut sebagai keluaran yang digunakan untuk mencapai suatu hasil dari suatu kegiatan atau program. Sedangkan *outcome* merupakan hasil dari suatu program, aktivitas atau dari kebijakan. *Value for money* bisa terwujud jika organisasi dinilai telah mempergunakan biaya input dengan nilai paling rendah untuk pencapaian output yang maksimal sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi.

2.4.2 Elemen-elemen Konsep *Value for Money*

Value for Money adalah suatu konsep pengelolaan organisasi di sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas Mardiasmo (2016 : 5), sebagai berikut:

a. Ekonomi

Ekonomi yang dimaksud yaitu terkait dengan pemerolehan atas *input* melalui kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga paling rendah. Ekonomi adalah perbandingan antara *input* dengan *input value* yang disebutkan pada satuan moneter. Pada ekonomi menjelaskan seperti apa upaya instansi sektor publik dalam mengurangi *input resources* yang dilaksanakan dengan menghindari pengeluaran biaya yang dinilai pemborosan serta kurang produktif.

b. Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan *output* atau *input* terhadap standar kinerja dan tujuan yang sudah di tetapkan sebelumnya. Efisiensi merupakan tercapainya *output* yang optimal dengan menggunakan nilai *input* yang rendah untuk pencapaian *output*.

c. Efektivitas

Efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan dari hasil program dengan target yang di tentukan atau secara singkatnya efektivitas adalah perbandingan *outcome* dengan *output*. Suatu kegiatan dikatakan efektif jika *output* yang dicapai memungkinkan untuk mewujudkan tujuan organisasi.

Selain ketiga elemen pokok diatas, perlu ditambah dua elemen lain menurut beberapa pihak karena dinilai tiga elemen saja cukup, yang meliputi keadilan (*equity*) sekaligus kesetaraan atau pemerataan (*equality*). Keadilan diartikan sebagai peluang sosial (*social opportunity*) yang sama dalam memperoleh pelayanan publik yang bermutu dan kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya diperlukan juga pemerataan distribusi (*equality*) yaitu pemakaian uang rakyat sekiranya tidak terfokus hanya pada anggota tertentu saja, melainkan juga dilaksanakan secara adil dan merata.

2.4.3 Indikator *Value for Money*

Mardiasmo (2016 : 164) berpendapat pemberian informasi yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan merupakan fungsi indikator kinerja pada konsep *value for money*.

Menurut Mardiasmo (2016 : 164) indikator *value for money* terdiri dari dua indikator yaitu:

1. Ekonomis
Ekonomis yang berarti memperhatikan tingkat kualitas pada harga terbaik (*spending less*) pada saat membeli suatu barang dan jasa.
2. Efisiensi
Efisiensi merupakan hasil dari pelaksanaan program tertentu tercapai dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin (*spending well*).

3. Efektivitas

Efektivitas berarti bahwa *kontribusi output* mengarah pada tercapainya sasaran dari tujuan yang ditentukan (*spending wisely*). Sedangkan efektivitas kualitas pelayanan mengacu pada konsistensi dan kepuasan publik dinilai dari menurunnya tingkat *complaint* dari masyarakat terhadap organisasi publik.

Atau secara sederhananya, berdasarkan penelitian sebelumnya dari Saskia et al., (2020) menyebutkan indikator dalam *value for money* berisi tentang:

1. Ekonomis dalam mengelola prosedur administrasi.
2. Efektivitas dalam melaksanakan program kerja.
3. Efisien dalam pengelolaan anggaran.

Yang menjadi harapan publik dengan di terapkan nya *value for money* pada organisasi sektor publik adalah ekonomis saat penggunaan dan alokasi sumber daya, dan efisien yang berarti pelaksanaannya lebih diminimalisir dengan hasil yang optimal, dan efisiensi dalam mencapai sasaran dan tujuan. Oleh karena itu, menurut Mustari (2020) didalam penelitiannya menjelaskan indikator konsep *value for money* antara lain:

1. Penggunaan sumber daya yang hemat dan tepat guna.
2. Penggunaan sumber daya *financial* secara optimal.
3. Proses menghasilkan *output* yang optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Implementasi konsep *value for money* diorganisasi sektor publik pastinya sangat menguntungkan serta bermanfaat baik bagi organisasi dan juga masyarakat. Manfaat dari implementasi konsep *value for money* dalam organisasi sektor publik yaitu: dapat memajukan produktivitas pelayanan publik, yang artinya pelayanan yang sudah di tetapkan sesuai target, dapat memajukan kualitas pelayanan terhadap publik, meminimalisir anggaran pelayanan publik, alokasi

biaya yang lebih mempertimbangkan keperluan publik, dapat memajukan pemahaman mengenai keuangan publik (*public costs awareness*) yang dijadikan sumber dari penerapan akuntabilitas publik (Mardiasmo 2016 : 151).

2.4.4 Langkah-langkah pengukuran *Value for Money*

a. Pengukuran Ekonomis

Rasio ekonomis adalah perbandingan pengeluaran organisasi dengan rencana anggaran yang ditentukan. Menurut Mardiasmo (2016 : 167) pengukuran ekonomi lebih memperhatikan nilai pemasukan yang dipakai. Pengukuran yang relatif dapat dikatakan ekonomis. Pertanyaan yang menunjukkan pengukuran ekonomi menurut Mardiasmo (2016 : 167) sebagai berikut:

1. Apakah belanja instansi lebih tinggi dari yang telah dianggarkan?
2. Apakah belanja instansi lebih tinggi daripada biaya instansi lain (sama) dan bisa dibandingkan?
3. Apakah instansi telah mempergunakan sumber daya keuangannya secara maksimal?

Adapun rumus pengukuran ekonomis menurut Mardiasmo (2016 : 167) adalah sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Input value}} \times 100\%$$

b. Pengukuran Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2016 : 167) efisiensi di ukur menggunakan rasio masukan (*input*) dan pengeluaran (*output*). Yang dimaksud dengan pengukuran efisiensi yaitu semakin tinggi *output* dibanding *input*, maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi organisasi.

Adapun rumus pengukuran efisiensi menurut Mardiasmo (2016 : 167) adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

c. Pengukuran Efektivitas

Suatu organisasi disektor publik dapat disebut sudah efektivitas jika organisasi mampu mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya (Mardiasmo 2016 : 168). Efektivitas merupakan pengukuran untuk menilai keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian tujuannya. Apabila semakin besar nilai rasio efektivitas, maka dapat dikatakan kegiatan tersebut lebih efektif.

Adapun rumus pengukuran efektivitas menurut Mardiasmo (2016 : 168) adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik seperti Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep *Value for Money* sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, yakni sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mohammad Noor Afriza (2020)	Analisis Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, <i>Value For Money</i> Dan Pengawasan Terhadap Realisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2020	Variabel Independen: Akuntabilitas Keuangan Daerah (X1) <i>Value For Money</i> (X2) Pengawasan (X3) Variabel Dependen: Realisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2020	Hasil penelitian menunjukkan variabel Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2020, sedangkan <i>Value For Money</i> tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2020
2	Niken Ayu Saskia, Moh. Amin, & Junaidi (2020)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Perwujudan Nilai Transparansi, Pengendalian Akuntansi, Akuntabilitas, <i>Value For Money</i> Terhadap Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik	Variabel Independen: Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) Perwujudan Nilai Transparansi (X2) Pengendalian Akuntansi (X3) Akuntabilitas (X4) <i>Value For Money</i> (X5) Variabel Dependen: Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, Perwujudan Nilai Transparansi, Pengendalian Akuntansi, Akuntabilitas dan <i>Value For Money</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan

				Akuntansi Keuangan Sektor Publik.
3	Mustari, S (2020)	Pengaruh Nilai-Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep <i>Value for Money</i> Terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik Pada Bappelitbangda Sul-Sel	<p>Variabel Independen: Nilai-nilai Transparansi (X1) Akuntabilitas (X2) Konsep <i>Value for Money</i> (X3)</p> <p>Variabel Dependen: Pengelolaan Keuangan Sektor Publik</p>	Hasil penelitian menunjukkan Transparansi, Akuntabilitas dan <i>Value for Money</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan di Sektor Publik.
4	Redi Antonius Nababan, Marlon Sihombing, & Husni Thamrin. (2018)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Berkonsep <i>Value for Money</i> pada Pemerintah di Kabupaten Dairi	<p>Variabel Independen: Akuntabilitas (X1) Transparansi (X2)</p> <p>Variabel Dependen: Pengelolaan Keuangan Berkonsep <i>Value for Money</i></p>	Hasil penelitian menunjukkan Akuntabilitas dan Transparansi secara signifikan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan berkonsep <i>Value for Money</i>
5	Ricky Ary Syahputa (2018)	Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, <i>Value for Money</i> , Kejujuran, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Pusat)	<p>Variabel Independen: Akuntabilitas Keuangan Daerah (X1) <i>Value for Money</i> (X2) Kejujuran (X4) Transparansi (X5) Pengawasan (X6)</p> <p>Variabel Dependen: Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa <i>Value For Money</i> , Kejujuran, Transparansi dan Pengawasan berhubungan secara positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan Akuntabilitas Keuangan Daerah menunjukkan hubungan negatif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa terdapat faktor lain yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan sektor publik bukan hanya Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep *Value for Money* saja. Oleh karena itu, peneliti ingin melanjutkan penelitian tersebut dengan berupaya mengembangkan penelitian yang memiliki perbedaan dari sisi variabel yang digunakan, populasi dan sampel, tahun penelitian serta studi empirisnya.

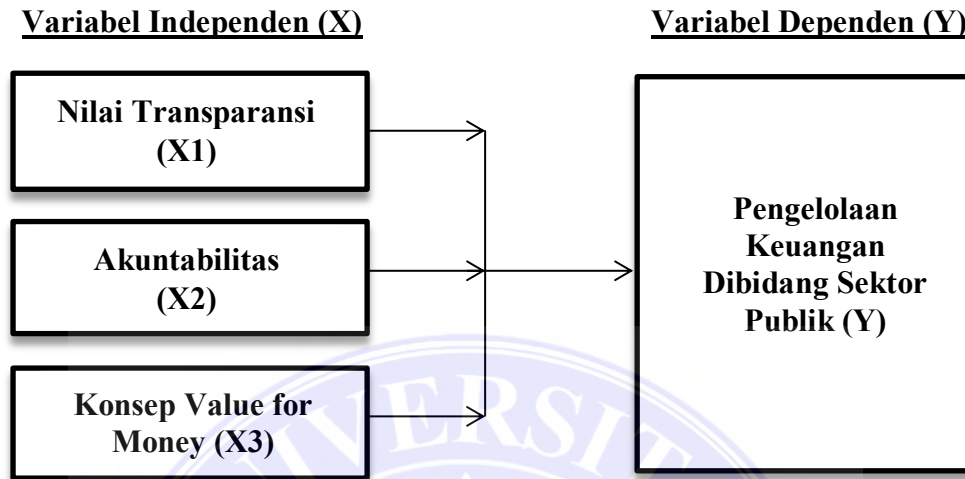
2.6 Kerangka Konseptual

Transparansi dan Akuntabilitas tidak hanya kemampuan untuk menunjukkan bagaimana anggaran publik ditetapkan dan dibelanjakan, tapi juga termasuk menunjukkan kemampuan organisasi publik dalam mengelola dana publik dibelanjakan untuk secara ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Penerapan konsep *Value for Money* pada organisasi sektor publik menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan mengingat dengan berkembangnya paksaan akuntabilitas publik serta sebagai upaya menciptakan *good governance*. Untuk memperbaiki pengelolaan keuangan sektor publik serta meningkatkan kualitas kinerja sektor publik dengan cara memperbaiki efektivitas dan kualitas pelayanan publik, meminimalisir pengeluaran pelayanan publik, dan juga memajukan pemahaman tentang pemakaian dana publik, oleh karena itu pentingnya nilai Transparansi, Akuntabilitas dan penerapan Konsep *Value for Money* untuk diterapkan.

Berlandaskan dari fenomena yang sudah dijelaskan dalam latar belakang, serta berdasarkan penjabaran landasan teoritis dan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, sehingga kerangka konseptual dalam penelitian tersebut dapat dilihat

pada gambar 2.1 dibawah ini yang mencerminkan hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen, sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa variabel bebas pada penelitian ini adalah Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep *Value for Money*. Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan Sektor Publik.

2.7 Hipotesis Penelitian

Menurut Iqbal Hasan (2002 : 50) Hipotesis penelitian berupa jawaban sementara dari permasalahan penelitian yang biasanya dinyatakan dalam gambaran yang dapat diuji secara empiris.

Hipotesis penelitian ini berdasarkan tinjauan pustaka (teori) dan gambar kerangka konseptual adalah sebagai berikut:

2.7.1 Pengaruh Nilai Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Dibidang Sektor Publik

Transparansi merupakan pengaksesan informasi yang sifatnya terbuka bagi masyarakat dengan maksud untuk menerangkan kejadian semasa proses pelaksanaan pemerintahan, transparansi memprioritaskan bahwa publik secara umum dapat mengetahui dan mendapat kemudahan akses terkait segala informasi tentang kebijakan pemerintah termasuk pengelolaan keuangan yang dilaksanakan pemerintah. Transparansi memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan dibidang sektor publik karena transparansi dapat menunjukkan bagaimana penyusunan pengelolaan laporan keuangan dilakukan secara jujur. Artinya, dengan tersedianya sistem yang terprogram langsung melalui IT maka hasil pengelolaan pelaporan keuangan lebih terpercaya dan terintegrasi mampu mengurangi terjadinya *fraud* atau kecurangan. Sebagai bentuk terwujudnya transparansi yang merupakan faktor pendukung adanya akuntabilitas, maka sistem yang terprogram langsung melalui IT tersebut merupakan bentuk keterbukaan (*openness*) pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya publik. Jika nilai transparansi diterapkan semakin baik, maka semakin baik pula pengelolaan keuangan dibidang sektor publik (Mardiasmo, 2009).

Hasil penelitian Redi Antonius Nababan, Marlon Sihombing, & Husni Thamrin tahun 2018 yang menyatakan bahwa transparansi secara signifikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan berkonsep *value for money*. Sehingga hipotesis pertama pada penelitian ini adalah:

H1 : Nilai Transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan di bidang sektor publik pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara.

2.7.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Dibidang Sektor Publik

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu etika yang memiliki hubungan dengan kesanggupan dalam menguraikan tindakan dan aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan dibidang sektor publik karena akuntabilitas berfungsi sebagai alat kontrol untuk mengukur berhasil atau tidaknya organisasi pada masa jabatan tertentu dengan meminta pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilaksanakan, pertanggungjawaban yang dimaksud yaitu dapat berupa pelaporan pengelolaan keuangan yang dapat diandalkan. Sedangkan penerapan pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu bentuk dari akuntabilitas dan sebagai bahan untuk mengukur kinerja berhasil atau tidaknya organisasi. Oleh karena itu, akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan jika pelaksanaan akuntabilitas yang diterapkan semakin baik, maka semakin baik pula pengelolaan keuangan dibidang sektor publik (Mardiasmo, 2009).

Berdasarkan hasil penelitian dari Ririn Rusrina (2011) dan Niken Ayu Saskia, Moh. Amin, & Junaidi (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan simultan terhadap pengelolaan keuangan sektor publik. Sehingga hipotesis kedua pada penelitian ini adalah:

H2 : Akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan di bidang sektor publik pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara.

2.7.3 Pengaruh Konsep *Value for Money* Terhadap Pengelolaan Keuangan Dibidang Sektor Publik

Penilaian kinerja dibidang sektor publik dengan konsep *value for money* merupakan konsep pengukuran nilai ekonomi, efektivitas, efisiensi kinerja suatu organisasi sektor publik. Menjadi hal yang penting sebab tujuannya untuk menghargai setiap uang yang dikeluarkan secara layak dan digunakan dengan semestinya. *Value for money* juga dijadikan sebagai ukuran atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan terkhusus di era digital saat ini, mengingat banyak kasus inefisiensi anggaran dan pemborosan menjadi dasar perlu diterapkannya konsep tersebut dalam aspek pengelolaan keuangan. Dengan mengimplementasikan prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan, maka pengelolaan keuangan di sektor publik akan semakin baik. Oleh karena itu untuk dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban instansi kepada publik konsep *value for money* penting diterapkan sebagai upaya memanfaatkan sumber daya publik dengan sebaik-baiknya (Mardiasmo, 2009).

Berdasarkan hasil penelitian Ricky Ary Syahputra (2018) yang menjelaskan konsep *value for money* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis ketiga dan keempat penelitian ini adalah:

H3 : Konsep *Value for Money* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan di bidang sektor publik pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara.

2.7.4 Pengaruh Simultan Nilai Transparansi, Akuntabilitas, Konsep *Value For Money* Terhadap Pengelolaan Keuangan Dibidang Sektor Publik

Nilai transparansi, akuntabilitas dan konsep *value for money* dapat berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap pengelolaan keuangan dibidang sektor publik karena penerapan nilai transparansi yang baik pada suatu organisasi bertujuan sebagai penyedia dan pemberi informasi yang bersifat komprehensif, informatif, andal dan relevan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut terutama informasi mengenai pengelolaan laporan keuangan sehingga mengurangi terjadinya kecurangan. Selain itu, untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan sektor publik kepada masyarakat prinsip akuntabilitas juga sangat perlu untuk ditingkatkan penerapannya. Konsep *value for money* yang meliputi aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas menjadi penting untuk diperhatikan dalam setiap pelaksanaan program pengelolaan keuangan karena sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban, oleh karena itu pengelolaan sumber daya publik diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, apabila nilai transparansi, akuntabilitas dan konsep *value for money* telah diterapkan dengan baik maka akan mempengaruhi pengelolaan keuangan menjadi semakin baik pula.

Berdasarkan hasil penelitian Mustari S (2020) nilai trans transparansi, akuntabilitas dan konsep *value for money* berpengaruh secara simultan terhadap

pengelolaan keuangan dibidang sektor publik. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis ketiga dan keempat penelitian ini adalah:

H4: Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep *Value for Money* berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan di bidang sektor publik pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif menurut Sugiyono (2003) adalah jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk memahami dan mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mengenai pengaruh nilai transparansi, akuntabilitas dan konsep *value for money* terhadap pengelolaan keuangan di sektor publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Dearah Provinsi Sumatera Utara (BAPPEDASU).

3.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada kantor Badan Perencanaan Pembangunan Dearah Provinsi Sumatera Utara (BAPPEDASU) yang beralamat di Jalan. Pangeran Diponegoro No. 21 A, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Dengan situs web resmi yang dapat diakses melalui bappeda.sumutprov.go.id.

3.1.3 Waktu Penelitian

Rincian waktu penelitian yang dibutuhkan peneliti dari awal penelitian hingga rencana penyelesaian penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1 yang dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Keterangan	2021	2022									
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	Sept	
1	Pengajuan Judul Skripsi											
2	Penyelesaian Proposal											
3	Bimbingan Proposal											
4	Seminar Proposal											
5	Pengumpulan Data											
6	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi											
7	Seminar Hasil											
8	Sidang Meja Hijau											

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah objek, keseluruhan anggota atau sekelompok orang, organisasi atau kumpulan yang sebelumnya sudah dirumuskan oleh peneliti secara jelas (Furchan :2004). Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah populasi pada Bappeda Provinsi Sumatera Utara sebanyak 105 orang yang merupakan Aparatur Sipil Negara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

No	Bidang	Jumlah Pegawai
1	Kepala Badan	1
2	Sekretaris Badan	1
3	Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya	23
4	Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	20
5	Bidang Perencanaan Sarana, Prasarana dan Kewilayahan	23
6	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	20
7	Kelompok Jabatan Fungsional	17
Jumlah		105

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2008 : 118) sampel merupakan komponen dari keseluruhan karakteristik pada sebuah populasi. Sedangkan metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2006) *purposive sampling* merupakan teknik penetapan sampel menggunakan kriteria atau pertimbangan tertentu.

Berdasarkan pertimbangan, maka diperoleh 41 sampel dari jumlah populasi yang merupakan pegawai yang memiliki pangkat pada golongan III dan IV pada Bappeda Sumatera Utara, karena golongan tersebut merupakan golongan tertinggi pada kelompok Aparatur Sipil Negara yang sudah pasti memahami mengenai bagaimana prosedur pengelolaan organisasi dilaksanakan dengan baik. Adapun bidang dan seksi atau sub bagian yang dijadikan pengambilan sampel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sampel Penelitian

No	Bidang	Jumlah Pegawai Gol III dan IV
1.	Bidang Perencanaan SDM dan Sosial Budaya	10
2.	Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan SDA	10
3.	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	10
4.	Seksi Bagian Keuangan	5
5.	Seksi Bagian Monitoring dan Informasi	3
6.	Seksi Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik	3
Jumlah		41

3.3 Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian terdapat hal yang dijadikan sebagai sasaran atau patokan yang disebut dengan variabel. Oleh karena itu, variabel disebut sebagai fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian untuk diteliti dan diukur. Operasional variabel merupakan variabel yang lengkap yang harus diamati dan dapat diukur guna mendapatkan data penelitian (Sugiyono : 2016). Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis variabel yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen.

a. Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2016) mendefinisikan variabel independen selaku variabel penyebab adanya perubahan pada variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini yaitu nilai transparansi, akuntabilitas dan konsep *value for money*.

b. Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2016), variabel dependen adalah variabel yang terpengaruhi dan disebut sebagai variabel yang jadi akibat dari adanya variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu pengelolaan keuangan disektor publik.

Tabel 3.4
Variabel Independen

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Skala Ukur
Nilai Transparansi (X1)	Transparansi adalah keterbukaan (<i>openness</i>) pemerintah untuk memberikan informasi seluas-luasnya tentang segala kegiatan atas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut. (Mardiasmo 2016 : 30)	1. Kerangka kerja hukum. 2. Kemudahan akses bagi publik. 3. Audit yang efektif serta independen. 4. Adanya campur tangan atau keterlibatan publik. (Andrianto 2007 : 21)	Likert
Akuntabilitas (X2)	Akuntabilitas adalah kewajiban pihak yang ditunjuk sebagai pemegang amanah (<i>agent</i>) untuk dapat menyajikan, memberi pertanggung jawaban, melaporkan, serta mengungkapkan semua aktivitas sebagai bentuk tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (<i>prinscipal</i>) yang mempunyai kewenangan untuk mendapatkan pertanggungjawaban tersebut. (Mardiasmo 2016 : 20)	1. Kejujuran (<i>abuse of power</i>). 2. Prosedur sistem informasi akuntansi yang baik. 3. Pertimbangan tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak. 4. Kebijakan pertanggungjawaban pemerintah. (Mardiasmo 2016 : 21)	Likert
Konsep <i>Value for Money</i> (X3)	<i>Value for Money</i> merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisien dan efektivitas. (Mardiasmo 2016 : 5)	1. Ekonomi 2. Efisiensi 3. Efektivitas (Mardiasmo 2016 : 164)	Likert

Tabel 3.5
Variabel Dependen

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Skala Ukur
Pengelolaan Keuangan Dibidang Sektor Publik (Y)	Pengelolaan keuangan sektor publik adalah semua hak dan kewajiban pusat dan daerah terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja suatu pemerintah daerah. Bratakusumah dan Solihin (2004)	1. Penyediaan informasi 2. Pengendalian manajemen 3. Akuntabilitas Mardiasmo (2016 : 18)	Likert

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang pada penelitian ini merupakan data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data berupa angka yang diproses menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistik (Sugiyono : 2015). Pada penelitian ini, data kuantitatifnya yakni berupa skor atau nilai berdasarkan jawaban-jawaban dari responden terkait pertanyaan yang tersedia dalam kuesioner atau angket yang disebarakan.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2016 : 225) data primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung dari narasumber berupa wawancara, pendapat individu atau sekelompok individu maupun dari hasil pengamatan suatu objek atau peristiwa.

Data sekunder menurut Sugiyono (2016 : 225) data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen dan disebut sebagai pendukung dari data primer yang berasal dari bahan-bahan literatur contohnya dokumen, laporan dan perpustakaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Data primer penelitian ini adalah kuesioner yang diisi oleh pegawai negeri sipil pada kantor Bappeda Provinsi Sumatera Utara dengan skala pengukuran menggunakan skala likert. Bentuk awal skala likert adalah 5 (lima) pilihan jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) sampai Sangat Setuju (SS) dengan ketentuan bobot nilai sebagai berikut:

Tabel 3.6
Bobot Nilai Kuesioner

No	Kategori	Bobot Nilai
1	Sangat Tidak Setuju (STS)	1
2	Tidak Setuju (TS)	2
3	Netral (N)	3
4	Setuju (S)	4
5	Sangat Setuju (SS)	5

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket dan wawancara. Kuesioner atau angket merupakan daftar pertanyaan secara tertulis yang diserahkan kepada subjek penelitian untuk proses pengumpulan informasi yang dibutuhkan seorang peneliti (Kusumah : 2011). Karena dengan menggunakan kuesioner dapat memudahkan responden dalam memberikan jawaban, sebab alternatif jawaban sudah disiapkan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu software SPSS. Analisis data terbagi menjadi 5 (lima) diantaranya sebagai berikut:

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dipergunakan untuk menyajikan, meringkas serta menguraikan suatu data kedalam bentuk informasi yang lebih jelas dan lengkap, sehingga menunjukkan gambaran data secara umum (Ghozali : 2018). Dengan statistic deskriptif maka data akan dihubungkan dengan variabel yang dipakai terdiri dari standar deviasi, rata-rata, maksimal, minimal, untuk mendeskripsikan variabel penelitian.

3.6.2 Uji Kualitas Data

Pengujian ini bertujuan untuk memperlihatkan berapa besar tingkat akurasi serta konsistensi suatu data yang sudah didapat dari proses penelitian. Uji kualitas data pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Uji Validitas

Pengujian validitas data bertujuan untuk mengetahui data yang diperoleh setelah proses penelitian adalah data yang reliabel atau valid berdasarkan alat ukur (kuesioner) yang dipakai. Validitas dapat diartikan sebagai kecermatan dari suatu item data untuk pengukuran berdasarkan apa yang perlu diukur (Priyatno 2013:110).

Uji signifikansi nya dapat dilaksanakan dengan cara “membandingkan nilai r hitung dengan r tabel, bila r hitungnya $>$ r tabel kemudian nilainya positif, maka variabel tersebut dinyatakan valid, namun apabila r hitung $<$ r tabel, maka variabel tersebut dinyatakan tidak valid” (Ghozali : 2011).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan menunjukkan konsistensi dalam mengukur gejala yang sama berdasarkan alat ukur yang digunakan (kuesioner) dapat. Pernyataan atau pertanyaan yang sudah diyakini valid pada uji validitasnya, kemudian akan dipastikan reliabilitasnya yaitu dengan menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha*. Disebutkan bahwa “suatu variabel dikatakan reliabel apabila memberikan nilai (α) 0,60” (Ghozali : 2011).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum mengerjakan analisis regresi linear berganda maka harus melakukan pengujian untuk asumsi klasik karena merupakan salah satu syarat dalam suatu analisis agar data nya memiliki makna dan juga bermanfaat. Uji asumsi klasik pada penelitian sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melakukan pengujian model regresi residual sudah berdistribusi normal atau tidak. Jika nilai residual sudah normal atau mendekati normal maka model regresi dikatakan baik. Dalam mendeteksi residual memiliki distribusi normal atau tidak dilaksanakan menggunakan analisis grafik dan analisis statistik (Ghozali : 2018). Pengujian pada penelitian ini memakai uji *Kolmogorov-Smirnov* dalam program aplikasi SPSS. Data berdistribusi normal tercermin jika nilai probabilitas (sig) > 0.05 , sedangkan data yang tidak terdistribusi normal apabila nilai probabilitas (sig) < 0.05 .

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2011) Uji multikolinearitas guna menunjukkan ada atau tidaknya kolerasi yang besar antar variabel independen. Metode pengujian ini

dilakukan guna menguji multikolinearitas dengan melihat nilai *Tolerance* serta VIF, sebagai dasar acuan pengujian bisa disimpulkan dibawah ini:

1. Bila nilai *Tolerance* $< 0,10$ serta $VIF > 10$, maka bisa disimpulkan jika terjadinya kemungkinan masalah multikolinearitas dalam penelitian.
2. Bila nilai *Tolerance* $> 0,10$ serta $VIF < 10$, maka bisa disimpulkan jika tidak ada masalah multikolinearitas dalam penelitian.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali : 2011) “Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengukur adanya model regresi yang mengalami ketidaksamaan *variance* dari residual melalui satu penelitian dengan penelitian lain. Apabila *variance* dari satu penelitian ke penelitian lain tetap, maka dapat disimpulkan model regresi dikategorikan tidak terjadi heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas yaitu melalui uji *Scatter Plot*. Dasar yang digunakan untuk menentukan heteroskedastisitas antara lain:

1. Apabila terdapat suatu pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola teratur maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas dan angka dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.4 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda merupakan hubungan yang secara linear antara dua atau lebih variabel bebas (independen $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$) dengan variabel dependen (Y). Analisis tersebut bertujuan untuk melihat bagaimana masing-masing variabel independen berhubungan secara positif atau negatif, selain itu juga untuk memperkirakan nilai variabel dependen, jika nilai variabel independen

terjadi kenaikan atau penurunan. Dapat disimpulkan persamaan Regresi Linier Berganda pada penelitian ini antara lain:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= Pengelolaan Keuangan (Sektor Publik)
X1	= Nilai Transparansi
X2	= Akuntabilitas
X3	= Konsep <i>Value for Money</i>
a	= Bilangan Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Bilangan Koefisien Regresi Berganda
E	= Error yang ditolerir (5%)

3.6.5 Uji Hipotesis Penelitian

Uji hipotesis yang digunakan yaitu uji signifikansi parsial (uji-t), uji signifikansi simultan (uji-f) dan koefisien determinasi (R^2).

a. Uji Signifikansi Parsial (Uji-T)

Uji t dilakukan untuk mengetahui berapa besar pengaruh satu variabel independen secara parsial (individual) dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai α 0.05, sehingga jika p value < 0.05 maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sementara itu jika p value > 0.05, maka variabel independent tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Menurut Singgih Santoso (2006) “uji signifikansi simultan (uji-f) yaitu pengujian atas variabel independen secara bersama-sama (simultan) yang bertujuan melihat apakah semua variabel bebas (independen) secara simultan dapat berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen)”. Taraf signifikansi yang digunakan yaitu 5%, jika signifikansi > 0,05 maka H_0 ditolak dan bila signifikansi

$< 0,5$ maka H_0 diterima.

c. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk memperkirakan berapa besar kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi yaitu 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi yang mendekati 1 (satu) mencerminkan bahwa variabel-variabel hampir memperlihatkan semua informasi yang diperlukan untuk memperkirakan variabel dependen (Ghozali, 2018).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai Transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik nilai transparansi diterapkan maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara.
2. Akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas diterapkan maka akan meningkatkan tanggungjawab pemerintah atas pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara.
3. Konsep *Value for Money* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik penerapan *Value for Money* dalam setiap kegiatan pengelolaan keuangan akan semakin meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan di bidang sektor publik karena memperhatikan aspek ekonomi, efisien dan efektif.
4. Nilai Transparansi, Akuntabilitas, dan Konsep *Value For Money* berpengaruh secara simultan terhadap Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik. Variabel-variabel tersebut mempunyai pengaruh positif yang signifikan

dengan jumlah f-hitung sebesar $34,926 > f\text{-tabel } 2,85$ dan nilai pada kolom $\text{sig } 0.000 < 0.05$.

5.2 Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Peneliti mengharapkan untuk kedepannya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara bisa meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah nya dengan cara memaksimalkan penerapan nilai transparansi. Karena transparansi dibentuk untuk memberikan informasi yang bersifat informatif, komprehensif, relevan dan andal bagi masyarakat atau pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Penerapan akuntabilitas juga harus dimaksimalkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah mengingat akuntabilitas merupakan suatu bentuk pemberian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sektor publik kepada masyarakat. Pada setiap pelaksanaan program, konsep *value for money* menjadi penting karna dengan memperhatikan segala aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas sumber daya dapat dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai bentuk pertanggungjawaban.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Agar hasil penelitian lebih relevan, peneliti selanjutnya diharapkan untuk mencoba atau menambah variabel lain terkait dengan pengelolaan keuangan dibidang sektor publik terutama pada era sistem informasi pemerintah yang berbasis elektronik saat ini. Peneliti selanjutnya dapat mengganti metode

penelitian menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan mewawancarai responden secara langsung agar responden lebih mengerti mengenai pernyataan yang ada dalam kuesioner sehingga hasil penelitian akan lebih tepat dan akurat.

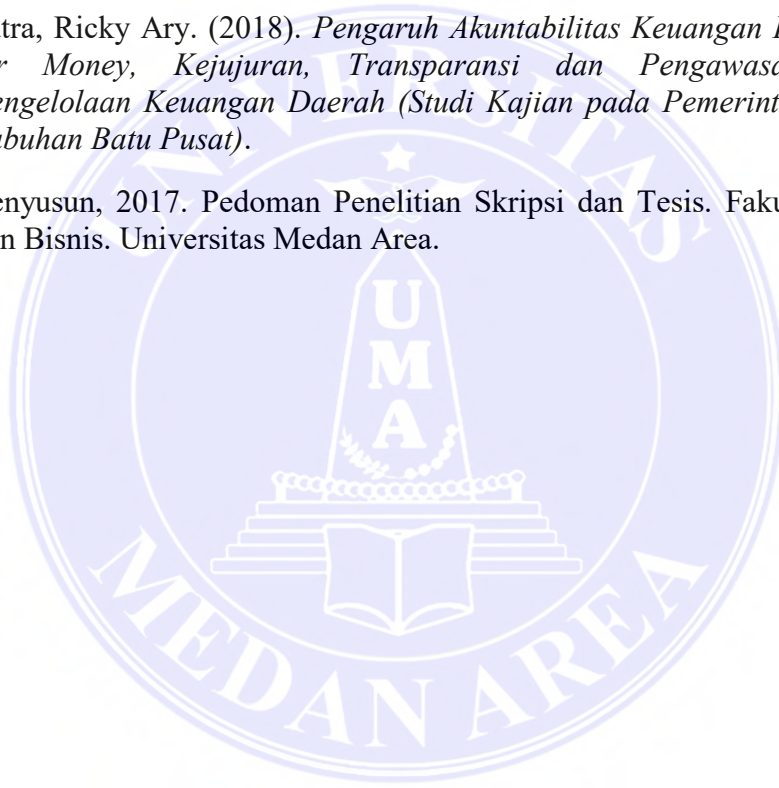


DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi 4)*. Salemba empat.
- Adhi, D. K., & Suhardjo, Y. (2013). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada pemerintah kota Tual). *Jurnal STIE Semarang*, 5(3), 93-111.
- Andrianto, N. (2007). *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Bayumedia Publishing.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Sebuah Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bintoro Tjokroamidjojo. (1984). *Pengantar Administrasi pembangunan*. LP3ES.
- BPKP, L. A. N. dan. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance, modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*.
- Bratakusumah, Dedy Supriadi, Solihin, Dadang. (2004). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta, Gramedia.
- Duwi Priyatno. (2013). *Mandiri Belajar Analisis Statistik Data Dengan SPSS*, Yogyakarta, Mediakom.
- Elwood, S. (n.d.). Parish and Town Councils: Financial Accountability and Management. *Local Government Studies*, 19, 368–386.
- Firmansyah, I. encep, & Rahmawati, P. D. (2020). Pengaruh Kepemimpinan dan Value for Money terhadap Good Government Governance Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung. *Competitive*, 15(1), 60–74.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi 9. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hasugian, F. T., Syahputra, R. A., & Harahap, A. R. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian Pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Pusat). *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 6(2), 175–185. <https://doi.org/10.51544/jma.v6i2.1997>
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta.
- Kusumah. (2011). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta Indeks.

- Kusumastuti, P. (2014). *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- M. Iqbal Hasan. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.
- Mardiasmo. (2009). Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2, 1–17.
- Mustari, S. (2020). *Pengaruh Nilai-Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value for Money Terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik Pada Bappelitbangda Sul-Sel*.
- Noor Afriza Mohammad. (2020). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money Dan Pengawasan Terhadap Realisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2020, 17, 438-445.
- Mustopadidjaja, A. R. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. LAN Kerjasama Duta Pertiwi Foundation.
- Nababan, R. A., Sihombing, M., & Thamrin, H. (2018). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi, terhadap Pengelolaan Keuangan Berkonsep Value For Money pada Pemerintah di Kabupaten Dairi. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 4(1), 108. <https://doi.org/10.24114/antro.v4i1.10157>
- P, L. L. K. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Sekertariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Sains, F. S. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah.
- Rusrina, R. (2011). Pengaruh Nilai-Nilai Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi SI*, 1–9.
- Saskia, N. A., Amin, M., & Junaedi. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Perwujudan Nilai Transparansi, Pengendalian Akuntansi, Akuntabilitas, Value For Money Terhadap Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik. *E-Jra*, 09(11), 53–69.
- Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan). *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 16–28. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.39>

- Septariani, J. (2018). Penerapan Konsep Value for Money Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Good Government Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Pada Kabupaten Musi Banyuasin. *BALANCE Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 158. <https://doi.org/10.32502/jab.v2i1.1169>
- Shafratunnisa, F. (2016). *Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kepada stakeholders di SD Islam Binakheir*.
- Singgih Santoso. (2006). *Menggunakan Statistik Non Parametrik*. PT. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&B*. Bandung: IKAPI
- Syahputra, Ricky Ary. (2018). *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value for Money, Kejujuran, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Pusat)*.
- Tim Penyusun, 2017. *Pedoman Penelitian Skripsi dan Tesis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Medan Area.





Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Medan, ... Mei 2022

Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth. Bapak/Ibu

Ditempat

Dengan hormat

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Suci Rahayu

NIM : 188330016

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir skripsi di Universitas Medan Area, maka peneliti sangat mengharapkan bantuan dari Bapak/Ibu/responden untuk dapat menjawab seluruh pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Pengaruh Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money Terhadap Pengelolaan Keuangan di Bidang Sektor Publik Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (BAPPEDASU)”**

Saya sangat memahami dan menghargai kesibukan dan waktu Bapak/Ibu responden. Oleh karena itu, saya perkirakan pengisian data kuesioner ini hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 15 menit, cukup memberikan jawaban untuk setiap pertanyaan.

Sesuai etika penelitian, data yang diperoleh dari Bapak/Ibu responden akan peneliti jaga kerahasiaannya dan akan dipergunakan hanya untuk

kepentingan penelitian saja. Peneliti menyadari waktu Bapak/Ibu adalah sangat berharga, tetapi waktu yang Bapak/Ibu responden luangkan untuk menjawab beberapa pertanyaan dalam kuesioner ini akan sangat bernilai tidak hanya untuk peneliti tetapi juga untuk para pembaca yang akan memerlukan skripsi penelitian ini. Oleh karena itu atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu responden dalam mendukung penelitian ini, peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Demikianlah hal ini saya sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu saya mengucapkan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :(boleh tidak diisi)

Umur :

Jenis Kelamin : () Laki-laki
() Perempuan

Jabatan :

Golongan :

Pendidikan Terakhir:

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Berilah tanda checklist (\checkmark) pada jawaban yang anda pilih di lembar jawaban yang telah disediakan. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan perasaan, pendapat, dan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/i yang sebenarnya.

No	Pilihan Jawaban	Bobot Nilai
1	Sangat Tidak Setuju (STS)	1
2	Tidak Setuju (TS)	2
3	Netral (N)	3
4	Setuju (S)	4
5	Sangat Setuju (SS)	5

A. PENGELOLAAN KEUANGAN DIBIDANG SEKTOR PUBLIK (Y)

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Melakukan review terhadap data-data laporan keuangan					
2.	Tercapainya tujuan sesuai dengan misi organisasi atau instansi					
3.	Pelayanan publik yang diselenggarakan harus dengan memerhatikan aspek-aspek pemerataan					
4.	Pendapatan daerah harus disetor sepenuhnya secara tepat waktu ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku					
5.	Setiap pejabat pengelola keuangan daerah haruslah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangannya secara periodik					
6.	Ketercapaian tujuan pemerintah yang dijabarkan pada program kerja, kegiatan dan kebijakan mencapai lebih dari 80%					
7.	Penyusun dan Penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan SAP, dan menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktiva operasi					
8.	Pelaporan keuangan dapat diukur dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas programnya					

A. NILAI TRANSPARANSI (X1)

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Pengumuman anggaran kepada masyarakat diyakini dapat meningkatkan transparansi					
2.	Informasi yang disampaikan kepada publik dapat meningkatkan transparansi anggaran					
3.	Mudah dalam mengakses dokumen publik tentang anggaran					
4.	Musrembang dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran kepada publik					
5.	Laporan pertanggungjawaban tahunan anggaran selalu disediakan tepat waktu					
6.	Transparansi anggaran diyakini dapat mengakomodasi usulan/suara rakyat					
7.	Pengumuman tentang anggaran bisa didapat setiap waktu bagi yang memerlukan					
8.	Pengumuman kebijakan tentang anggaran mudah didapatkan oleh publik					
9.	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran harus diawasi secara terus menerus					

B. AKUNTABILITAS (X2)

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Tahapan pengelolaan keuangan anggaran melibatkan unsur-unsur masyarakat					
2.	Anggaran disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat luas					
3.	Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan anggaran					
4.	Indikator hasil kinerja yang akan dicapai telah ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi anggaran					
5.	Laporan pertanggungjawaban dalam penyajian anggaran harus tepat waktu dan menyertakan informasi masa lalu					
6.	Dalam mengevaluasi suatu anggaran, hanya membandingkan target dengan realisasi/sesungguhnya					
7.	Anggaran dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi (vertical) dan juga kepada masyarakat luas (horizontal)					
8.	Pengalokasian anggaran selalu mengikuti proses dan prosedur yang berlaku					
9.	Penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku guna memberikan hasil pengelolaan yang baik					

C. KONSEP VALUE FOR MONEY (X3)

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Program kerja dilaksanakan dengan memanfaatkan Uang Rupiah sebaik mungkin dengan konsep <i>value for money</i> yang berorientasi kepentingan publik					
2.	Setiap program kerja dilaksanakan dan dikelola secara ekonomis agar terhindar dari pemborosan anggaran					
3.	Setiap program kerja dilaksanakan dan dikelola dengan anggaran secara efisien					
4.	Setiap program kerja dilaksanakan dan dikelola secara efektif sesuai dengan target yang direncanakan					
5.	Adanya pemerataan anggaran pada setiap program yang disesuaikan dengan kebutuhan program tersebut					
6.	Alokasi belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik					
7.	Pentingnya penerapan prinsip ekonomis, efisien dan efektif dalam penggunaan anggaran					
8.	Konsep <i>value for money</i> merupakan suatu metode untuk menciptakan <i>good governance</i> yang akuntabel, transparan, ekonomis, efisien dan efektif					
9.	Dalam melaksanakan kegiatan harus menghindari kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang tanpa tujuan atau kurang jelas					

Lampiran 2 Jawaban Responden

NO	Pengelolaan Keuangan Dibidang Sektor Publik (Y)								Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	
1	4	4	3	3	4	4	4	4	30
2	4	5	5	5	4	5	5	5	38
3	4	5	4	5	5	5	4	4	36
4	5	4	5	4	4	4	5	4	35
5	5	4	5	5	4	4	5	5	37
6	4	3	4	4	4	4	4	4	31
7	5	5	5	5	5	5	5	5	40
8	4	5	4	4	4	4	5	5	35
9	4	4	5	5	5	5	5	5	38
10	4	4	4	4	4	5	5	5	35
11	5	5	4	4	5	4	5	5	37
12	5	5	5	4	5	4	4	4	36
13	5	5	4	4	4	5	5	5	37
14	4	4	5	5	5	5	5	5	38
15	4	5	5	4	4	4	4	5	35
16	4	4	3	3	4	4	4	4	30
17	5	5	5	5	5	5	5	5	40
18	4	4	5	4	5	5	5	5	37
19	5	5	5	5	5	5	5	5	40
20	4	5	5	4	4	5	5	5	37
21	5	4	4	5	5	5	5	5	38
22	4	5	4	5	4	5	5	5	37
23	4	4	3	4	4	4	4	4	31
24	5	5	5	5	4	5	5	5	39
25	5	5	4	4	4	5	5	5	37
26	4	4	5	5	5	5	5	5	38
27	5	4	4	5	4	4	5	5	36
28	4	4	5	4	5	4	4	5	35
29	5	5	4	3	4	4	5	5	35
30	5	5	5	4	4	4	5	4	36
31	5	4	5	5	4	4	5	5	37
32	5	5	4	5	5	5	4	5	38
33	4	4	4	5	5	5	5	5	37
34	5	5	5	5	5	5	5	5	40
35	4	5	5	5	4	4	5	4	36
36	4	4	5	5	4	5	5	5	37
37	5	4	5	5	5	4	4	5	37
38	5	5	5	4	4	5	5	5	38
39	5	5	5	4	4	5	5	5	38

40	4	4	5	5	5	5	5	5	38
41	5	5	5	5	5	5	5	5	40

NO	Nilai Transparansi (X1)									Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	
1	4	4	4	4	3	3	3	3	4	32
2	4	5	5	5	4	5	4	4	5	41
3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	38
4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	34
5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	39
6	4	3	4	3	4	4	4	3	3	32
7	5	5	5	4	5	4	4	4	4	40
8	5	5	4	4	4	4	4	4	4	38
9	5	5	5	4	5	5	4	4	4	41
10	5	5	4	4	4	4	4	4	5	39
11	5	5	4	4	4	4	4	4	5	39
12	4	4	3	4	4	3	3	4	4	33
13	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35
14	5	4	4	5	4	5	5	4	5	41
15	5	5	4	4	4	4	4	4	4	38
16	4	5	4	3	3	4	4	4	5	36
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
18	5	5	4	4	4	4	4	4	5	39
19	4	4	4	4	4	5	4	4	5	38
20	4	4	4	4	4	4	4	4	5	37
21	5	5	5	4	4	4	4	4	4	39
22	4	4	4	4	4	3	3	4	4	34
23	4	5	4	4	4	4	4	4	5	38
24	5	5	5	4	4	4	4	5	5	41
25	5	4	5	4	4	3	4	5	5	39
26	4	5	4	4	4	4	5	5	5	40
27	5	4	5	4	5	3	4	4	4	38
28	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
29	5	5	4	4	4	4	4	5	5	40
30	4	3	4	4	4	4	3	4	4	34
31	5	5	5	4	4	4	4	4	4	39
32	5	4	5	5	5	4	4	4	5	41
33	5	4	5	4	4	4	4	5	5	40
34	5	4	5	4	3	4	4	4	5	38
35	5	5	4	4	4	5	4	5	5	41
36	4	5	4	4	4	4	4	5	5	39
37	5	4	4	4	4	4	4	4	5	38
38	4	4	5	4	5	5	4	4	5	40

39	5	4	4	5	5	5	4	5	4	41
40	5	4	5	4	5	5	3	5	4	40
41	4	4	4	4	3	3	3	4	4	33

NO	Akuntabilitas (X2)									Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	
1	3	3	4	4	4	4	4	4	4	34
2	4	4	4	5	4	5	4	5	5	40
3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	34
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
5	3	4	3	3	5	3	5	5	5	36
6	3	3	4	4	3	4	4	3	4	32
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
8	3	3	4	4	4	4	4	4	4	34
9	4	4	4	4	5	5	5	4	4	39
10	3	3	4	4	4	4	4	4	5	35
11	2	2	4	4	4	4	4	5	5	34
12	5	4	4	4	4	4	3	4	4	36
13	3	3	4	4	4	4	4	4	4	34
14	4	5	4	4	4	5	4	4	4	38
15	3	3	3	4	4	5	5	5	5	37
16	2	3	5	3	4	5	4	4	4	34
17	5	4	4	5	5	4	4	5	5	41
18	5	4	4	4	4	3	4	5	4	37
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
20	5	5	4	5	4	4	4	4	4	39
21	4	4	4	4	4	4	5	5	5	39
22	4	4	4	3	5	4	5	5	5	39
23	3	2	5	5	4	4	4	4	5	36
24	3	3	4	5	5	3	5	5	5	38
25	3	2	4	5	5	3	5	5	5	37
26	4	5	4	4	5	3	5	4	4	38
27	4	5	3	4	4	3	4	5	4	36
28	4	4	4	4	4	4	3	4	3	34
29	5	5	4	4	4	4	4	4	5	39
30	3	3	3	4	4	4	4	4	4	33
31	5	3	5	4	4	4	5	5	5	40
32	2	5	5	5	5	4	4	4	4	38
33	4	4	4	4	4	4	4	5	5	38
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
35	3	3	3	4	4	4	4	5	5	35
36	4	4	3	4	5	5	5	5	4	39

37	3	3	4	4	4	5	5	4	4	36
38	4	4	4	4	5	4	5	4	4	38
39	5	5	5	5	4	3	4	4	4	39
40	3	4	4	4	5	4	5	4	5	38
41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45

NO	Konsep Value for Money (X3)									Total X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	
1	3	4	4	4	4	3	4	4	4	34
2	5	4	5	5	4	4	4	5	5	41
3	5	4	4	4	4	3	3	4	4	35
4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	34
5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	39
6	4	4	4	4	3	3	3	4	4	33
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
8	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
10	4	4	4	4	4	5	4	5	4	38
11	5	4	4	4	4	4	4	5	5	39
12	4	3	4	4	4	3	4	4	4	34
13	5	4	5	4	5	5	5	4	4	41
14	5	5	4	4	4	5	4	4	5	40
15	4	4	3	3	4	3	4	4	4	33
16	4	4	3	3	4	3	4	4	4	33
17	5	5	4	4	4	4	4	5	5	40
18	4	4	4	4	5	4	4	5	5	39
19	4	4	4	4	5	5	5	4	5	40
20	5	5	5	4	4	4	4	4	4	39
21	4	4	4	4	4	4	4	5	5	38
22	4	5	4	4	4	4	5	4	4	38
23	3	4	4	3	3	4	4	4	4	33
24	4	4	5	4	4	5	4	5	5	40
25	3	4	4	4	4	4	3	4	4	34
26	4	4	4	4	4	4	5	5	4	38
27	4	5	4	4	5	4	4	4	4	38
28	4	4	4	4	4	4	4	5	4	37
29	4	4	4	4	3	3	3	4	4	33
30	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
31	5	5	5	4	4	4	4	4	4	39
32	5	5	4	4	4	4	4	5	5	40
33	5	4	4	4	5	4	4	4	5	39
34	4	4	4	4	5	5	5	5	5	41
35	5	5	4	4	4	4	4	4	4	38

36	3	3	4	4	4	4	4	5	5	36
37	4	4	4	4	5	4	4	5	5	39
38	4	4	4	4	4	5	5	4	5	39
39	4	4	4	4	4	4	4	5	4	37
40	5	4	4	4	5	5	4	5	4	40
41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45

Lampiran 3 Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Rang e	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Nilai Transparansi (X1)	41	13	32	45	38.17	2.863
Akuntabilitas (X2)	41	13	32	45	37.56	3.279
Konsep Value For Money (X3)	41	12	33	45	38.00	3.209
Pengelolaan Keuangan Dibidang Sektor Publik (Y)	41	10	30	40	36.59	2.500
Valid N (listwise)	41					

Lampiran 4 Uji Normalitas Data

UJI VALIDITAS DATA VARIABEL Y

Correlations

	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	TOTAL_ Y
Y.1 Pearson Correlation	1	.379*	.212	.098	.077	-.029	.241	.190	.449*
Y.1 Sig. (2-tailed)		.015	.183	.540	.633	.857	.129	.235	.003
Y.1 N	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Y.2 Pearson Correlation	.379*	1	.194	.019	-.020	.245	.221	.174	.465**
Y.2 Sig. (2-tailed)	.015		.224	.906	.902	.122	.166	.278	.002
Y.2 N	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Y.3 Pearson Correlation	.212	.194	1	.482*	.261	.246	.395	.359	.693**
Y.3 Sig. (2-tailed)	.183	.224		.001	.099	.121	.011	.021	.000
Y.3 N	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Y.4 Pearson Correlation	.098	.019	.482*	1	.442*	.463*	.328*	.391*	.705**
Y.4 Sig. (2-tailed)	.540	.906	.001		.004	.002	.036	.011	.000
Y.4 N	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Y.5 Pearson Correlation	.077	-.020	.261	.442*	1	.346*	-.070	.232	.487**
Y.5 Sig. (2-tailed)	.633	.902	.099	.004		.027	.665	.145	.001
Y.5 N	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Y.6 Pearson Correlation	-.029	.245	.246	.463*	.346*	1	.444*	.511*	.661**
Y.6 Sig. (2-tailed)	.857	.122	.121	.002	.027		.004	.001	.000
Y.6 N	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Y.7 Pearson Correlation	.241	.221	.395*	.328*	-.070	.444*	1	.522*	.618**

	Sig. (2-tailed)	.129	.166	.011	.036	.665	.004		.000	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Y.8	Pearson Correlation	.190	.174	.359*	.391*	.232	.511*	.522*	1	.675**
	Sig. (2-tailed)	.235	.278	.021	.011	.145	.001	.000		.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41
TOTAL_Y	Pearson Correlation	.449*	.465*	.693*	.705*	.487*	.661*	.618*	.675*	1
	Sig. (2-tailed)	.003	.002	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UJI VALIDITAS DATA VARIABEL X1

		Correlations									
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	TOTAL_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.340	.455*	.306	.376	.225	.295	.261	.064	.611
	Sig. (2-tailed)		.030	.003	.052	.015	.157	.061	.100	.691	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
X1.2	Pearson Correlation	.340*	1	.142	.049	.064	.208	.351*	.283	.386*	.553**
	Sig. (2-tailed)	.030		.375	.759	.691	.192	.024	.072	.013	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
X1.3	Pearson Correlation	.455*	.142	1	.285	.416*	.248	.204	.173	.071	.554**
	Sig. (2-tailed)	.003	.375		.071	.007	.117	.201	.279	.660	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
X1.4	Pearson Correlation	.306	.049	.285	1	.376*	.346*	.280	.232	.202	.547**
	Sig. (2-tailed)	.052	.759	.071		.015	.027	.076	.145	.205	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
X1.5	Pearson Correlation	.376*	.064	.416*	.376*	1	.481*	.210	.282	.043	.595**
	Sig. (2-tailed)	.015	.691	.007	.015		.001	.189	.075	.790	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
X1.6	Pearson Correlation	.225	.208	.248	.346*	.481*	1	.436*	.269	.285	.674**
	Sig. (2-tailed)	.157	.192	.117	.027	.001		.004	.089	.071	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
X1.7	Pearson Correlation	.295	.351*	.204	.280	.210	.436*	1	.270	.438*	.643**
	Sig. (2-tailed)	.061	.024	.201	.076	.189	.004		.088	.004	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41

X1.8	Pearson Correlation	.261	.283	.173	.232	.282	.269	.270	1	.464*	.607**
	Sig. (2-tailed)	.100	.072	.279	.145	.075	.089	.088		.002	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
X1.9	Pearson Correlation	.064	.386*	.071	.202	-	.285	.438*	.464*	1	.543**
	Sig. (2-tailed)	.691	.013	.660	.205	.790	.071	.004	.002		.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
TOTAL_X1	Pearson Correlation	.611*	.553*	.554*	.547*	.595*	.674*	.643*	.607*	.543*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UJI VALIDITAS DATA VARIABEL X2

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	TOTAL _ X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.659*	.250	.334	.171	.079	.076	.260	.078	.692
	Sig. (2-tailed)		.000	.115	.033	.285	.624	.638	.101	.626	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
X2.2	Pearson Correlation	.659*	1	.203	.225	.342*	.113	.089	.074	-.112	.637**
	Sig. (2-tailed)	.000		.203	.158	.028	.482	.579	.645	.486	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
X2.3	Pearson Correlation	.250	.203	1	.457*	.153	.230	.064	-.098	.120	.481**
	Sig. (2-tailed)	.115	.203		.003	.338	.148	.692	.540	.455	.001
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
X2.4	Pearson Correlation	.334*	.225	.457*	1	.242	.074	.053	.163	.224	.547**
	Sig. (2-tailed)	.033	.158	.003		.127	.645	.741	.308	.158	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
X2.5	Pearson Correlation	.171	.342*	.153	.242	1	.045	.640*	.417*	.300	.621**
	Sig. (2-tailed)	.285	.028	.338	.127		.779	.000	.007	.056	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
X2.6	Pearson Correlation	.079	.113	.230	.074	.045	1	.164	.017	.078	.365*
	Sig. (2-tailed)	.624	.482	.148	.645	.779		.304	.917	.627	.019
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
X2.7	Pearson Correlation	.076	.089	.064	.053	.640*	.164	1	.424*	.471*	.532**
	Sig. (2-tailed)										
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41

X2.8	Sig. (2-tailed)	.638	.579	.692	.741	.000	.304		.006	.002	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
	Pearson Correlation	.260	.074	-.098	.163	.417*	.017	.424*	1	.631*	.525**
X2.9	Sig. (2-tailed)	.101	.645	.540	.308	.007	.917	.006		.000	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
	Pearson Correlation	.078	-.112	.120	.224	.300	.078	.471*	.631*	1	.474**
TOTAL_X2	Sig. (2-tailed)	.626	.486	.455	.158	.056	.627	.002	.000		.002
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
	Pearson Correlation	.692*	.637*	.481*	.547*	.621*	.365*	.532*	.525*	.474*	1
TOTAL_X2	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000	.000	.019	.000	.000	.002	
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

UJI VALIDITAS DATA VARIABEL X3

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	TOTAL_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.497**	.396*	.425**	.329*	.266	.157	.065	.216	.594**
	Sig. (2-tailed)		.001	.010	.006	.036	.093	.327	.688	.174	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
X3.2	Pearson Correlation	.497**	1	.442**	.301	.176	.285	.244	.044	.133	.545**
	Sig. (2-tailed)	.001		.004	.056	.270	.071	.125	.787	.408	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
X3.3	Pearson Correlation	.396*	.442**	1	.690**	.250	.481**	.299	.274	.274	.688**
	Sig. (2-tailed)	.010	.004		.000	.116	.001	.058	.083	.083	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
X3.4	Pearson Correlation	.425**	.301	.690**	1	.397*	.442**	.310*	.424**	.424**	.727**
	Sig. (2-tailed)	.006	.056	.000		.010	.004	.049	.006	.006	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
X3.5	Pearson Correlation	.329*	.176	.250	.397*	1	.536**	.543**	.266	.440**	.683**
	Sig. (2-tailed)	.036	.270	.116	.010		.000	.000	.093	.004	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
X3.6	Pearson Correlation	.266	.285	.481**	.442**	.536**	1	.644**	.393*	.468**	.787**
	Sig. (2-tailed)	.093	.071	.001	.004	.000		.000	.011	.002	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41

X3.7	Pearson Correlation	.157	.244	.299	.310*	.543**	.644**	1	.251	.340*	.658**
	Sig. (2-tailed)	.327	.125	.058	.049	.000	.000		.114	.030	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
X3.8	Pearson Correlation	.065	.044	.274	.424**	.266	.393*	.251	1	.505**	.527**
	Sig. (2-tailed)	.688	.787	.083	.006	.093	.011	.114		.001	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
X3.9	Pearson Correlation	.216	.133	.274	.424**	.440**	.468**	.340*	.505**	1	.636**
	Sig. (2-tailed)	.174	.408	.083	.006	.004	.002	.030	.001		.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
TOTAL_X3	Pearson Correlation	.594**	.545**	.688**	.727**	.683**	.787**	.658**	.527**	.636**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

UJI RELIABILITAS DATA Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.734	8

UJI RELIABILITAS DATA X1

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.765	9

UJI RELIABILITAS DATA X2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.695	9

UJI RELIABILITAS DATA X3

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.824	9

Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik

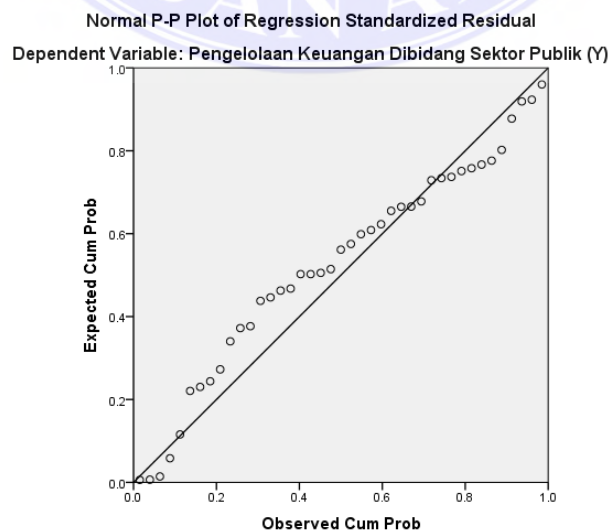
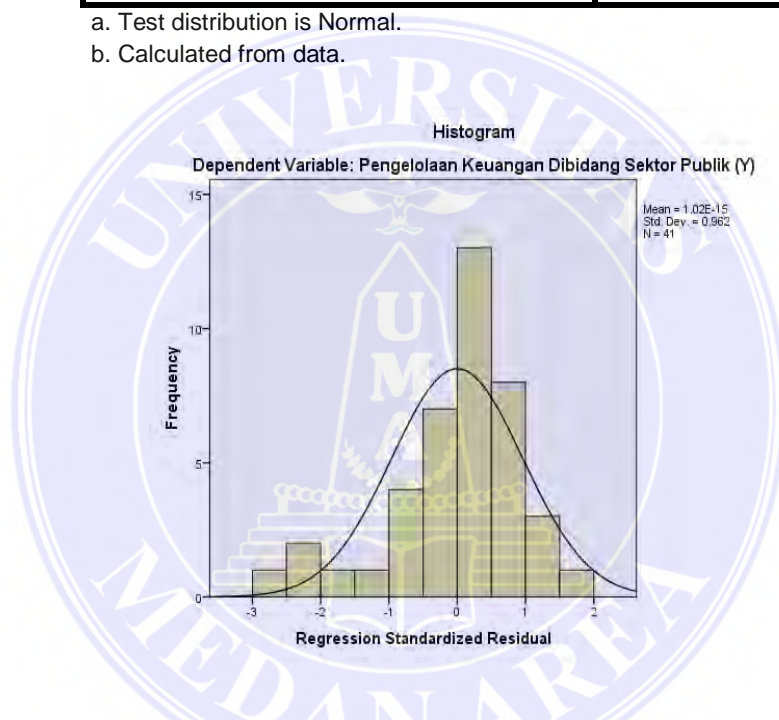
UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		41
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.27701595
	Absolute	.143
Most Extreme Differences	Positive	.093
	Negative	-.143
Kolmogorov-Smirnov Z		.915
Asymp. Sig. (2-tailed)		.373

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



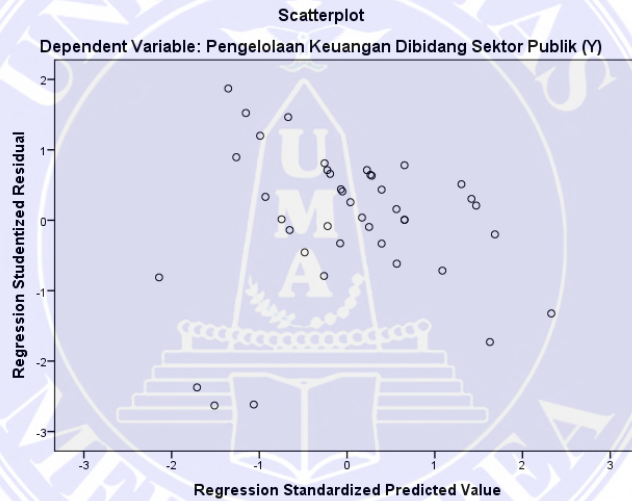
UJI MULTIKOLINEARITAS (VIF DAN TOLERANCE)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.643	3.348		1.387	.174		
1 Nilai Transparansi (X1)	.197	.079	.226	2.497	.017	.860	1.163
1 Akuntabilitas (X2)	.284	.081	.372	3.517	.001	.629	1.589
1 Konsep Value For Money (X3)	.362	.084	.464	4.326	.000	.612	1.633

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Dibidang Sektor Publik (Y)

UJI HETEROKEDASTISITAS



Lampiran 6 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.643	3.348		1.387	.174
1 Nilai Transparansi (X1)	.197	.079	.226	2.497	.017
1 Akuntabilitas (X2)	.284	.081	.372	3.517	.001
1 Konsep Value For Money (X3)	.362	.084	.464	4.326	.000

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Dibidang Sektor Publik (Y)

Lampiran 7 Uji Hipotesis

UJI T PARSIAL

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.643	3.348		1.387	.174
1 Nilai Transparansi (X1)	.197	.079	.226	2.497	.017
1 Akuntabilitas (X2)	.284	.081	.372	3.517	.001
1 Konsep Value For Money (X3)	.362	.084	.464	4.326	.000

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Dibidang Sektor Publik (Y)

UJI F SIMULTAN

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	184.720	3	61.573	34.926	.000 ^b
1 Residual	65.231	37	1.763		
Total	249.951	40			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Dibidang Sektor Publik (Y)

b. Predictors: (Constant), Konsep Value For Money (X3), Nilai Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2)

UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.860 ^a	.739	.718	1.328

a. Predictors: (Constant), Konsep Value For Money (X3), Nilai Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2)

b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Dibidang Sektor Publik (Y)

Lampiran 8 Surat Izin Penelitian



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 Medan Estate Telp (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70A/Jl. Setia Budi No. 79B Medan Telp (061) 8225602, 8201994, Fax. (061) 8226331
Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website:uma.ac.id/ekonomi.uma.ac.id email fakultas:ekonomi@uma.ac.id

Nomor : 1640/FEB/01.1/IV/2022
Lamp :
Perihal : Izin Research / Survey

15 April 2022

Kepada Yth,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (BAPPEDASU)

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan,
mengharapkan bantuan saudara kepada mahasiswa kami :

Nama : SUCI RAHAYU
N P M : 188330016
Program Studi : Akuntansi
Judul : Pengaruh Nilai Transparansi, Akuntabilitas Dan Konsep Value For Money, Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (BAPPEDASU)

Untuk diberi izin Research / Survey yang Saudara pimpin selama Satu Bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah suatu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang
inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni

Dr. Wan Suryani, SE, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Mahasiswa ybs
4. Peringgal

Lampiran 9 Surat Selesai Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan P. Diponegoro No. 21-A Telp. (061) 4538045, (061) 4571306, Fax. (061) 4513830
E-mail: bappeda@sumutprov.go.id; Homepage: <http://www.bappeda.sumutprov.go.id>
Medan Kode Pos 20152

Medan, 30 April 2022

Nomor : 071/797/Sekr/Bappeda/IV/2022
Sifat :
Lampiran : -
Perihal : Surat Selesai Penelitian

Kepada Yth,
Sdr. Wakil Dekan FEB Univ. Medan Area
di-
Medan

Berdasarkan Surat Wakil Dekan Bidang Kependidikan, Penelitian dan Pengabdian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Medan Area Nomor 1640/FEB/83301.1/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 perihal Izin Research / Survey dan Surat Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 071/529/Sekr/Bappeda/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Izin Research / Survey, yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : Suci Rahayu
Nim : 188330016
Prog. Studi : Strata 1 Akuntansi

Mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan Riset di Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Utara, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Pengaruh Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep *Value For Money*, Terhadap Pengelolaan Keuangan di Bidang Sektor Publik Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara".

Demikian hal ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dipedomani sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH



NIP. 19770628 200502 1 001

Tembusan Yth :

1. Bapak Plt. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara (sebagai laporan);
2. Para Kepala Bidang dilingkungan Bappeda Provsu;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui;
4. Peringgal.